

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SAITNIHUTA DALAM
MEWUJUDKAN PERENCANAAN STRATEGIK (VISI DAN MISI)
KABUPATEN SAMOSIR**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SISKA DEWI NAIBAHO

NIM. 500627395

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SAITNIHUTA DALAM MEWUJUDKAN
PERENCANAAN STRATEGIK (VISI DAN MISI) KABUPATEN SAMOSIR

Siska Dewi Naibaho
siskadewinaibaho@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Visi Kabupaten Samosir tahun 2016 – 2021 berbunyi “ Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian” . Saat ini sektor pariwisata merupakan penggerak ekonomi paling ampuh di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, sudah banyak desa yang dulunya miskin kini menjadi sejahtera karena pariwisata. Desa Saitnihuta merupakan salah satu desa di Kabupaten Samosir yang memiliki potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana masyarakat desa saitnihuta berpartisipasi dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa dan kaitannya untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten samosir. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif deskriptif. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa Saitnihuta, Sekretaris Desa Saitnihuta, Tokoh Agama di Desa Saitnihuta, Tokoh Adat di Saitnihuta, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih rendah, sedangkan partisipasi dalam penerimaan hasil pembangunan cukup tinggi kecuali untuk pemeliharaan rutin. Arah penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur desa dan hal ini mendukung perwujudan perencanaan strategik Kabupaten Samosir. Untuk itu, pemerintah desa saitnihuta perlu melakukan langkah – langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana disarankan dalam penelitian ini.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat desa, partisipasi perencanaan pembangunan, pengembangan wisata



ABSTRACT

PARTICIPATION OF SAITNIHUTA VILLAGER TO ACTUALIZE STRATEGIC PLANNING (VISION AND MISSION) OF SAMOSIR REGENCY

Siska Dewi Naibaho
siskadewinaibaho@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Samosir Regency's Vision year 2016 – 2021 read "The realization of the Prosperous, Independent and Competitive Samosir Society Based on Tourism and Agriculture". At present the tourism sector is the most powerful economic driver in various parts of the world. In Indonesia, many villages that were once poor have now become prosperous because of tourism. Saitnihuta Village is one of the villages in Samosir Regency which has the potential for tourism to be developed. This research is intended to see how the Saitnihuta villager participates in development, the direction of the use of village funds and its relation to realize the vision and mission of Samosir Regency. The research conducted was qualitative descriptive. The research subjects included Saitnihuta Village Chief, Saitnihuta Village Secretary, Religious Leaders in Saitnihuta Village, Indigenous People in Saitnihuta, and the community. The results of the study show that the level of village community participation in development planning and implementation is still low, while participation in the receipt of development outcomes is quite high except for routine maintenance. The direction of using village fund to build village infrastructure and this supports the realization of Samosir Regency's strategic planning. For this reason, the Saitnihuta village government needs to take steps to increase community participation as suggested in this study.

Keyword: villager participation, participation in development planning, tourism development



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam Mewujudkan Perencanaan Strategik (Visi dan Misi) Kabupaten Samosir**" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 3 September 2019

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
B6680AFF564248329

6000
ENAM RIBURUPIAH

SISKA DEWI NAIBAHO
NIM. 500627395

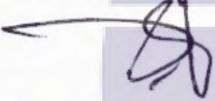
PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam
: Mewujudkan Perencanaan Strategik (Visi dan Misi)
Kabupaten Samosir

Penyusun TAPM : Siska Dewi Naibaho, SE
NIM : 500627395
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi
Publik
Hari/Tanggal : Sabtu/ 31 Agustus 2019

Menyetujui :

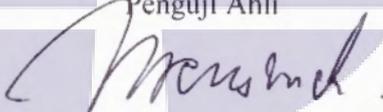
Pembimbing II,


Dr. Ari Juliana, M.A.
NIP. 195807011988032001

Pembimbing I,


Dr. Warjo, M.A.
NIP. 197408062006041003

Penguji Ahli

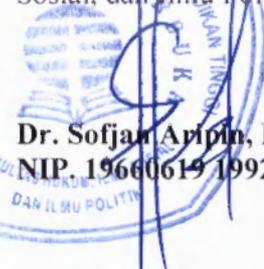

Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan
Politik


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.19591027 198603 1 003

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu
Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)


Dr. Sofjan Arifin, M. Si
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Siska Dewi Naibaho
NIM : 500627395
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam Mewujudkan
Perencanaan Strategik (Visi dan Misi) Kabupaten Samosir

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program
Pascasarjana Universitas Terbuka pada :
Hari/Tanggal : Sabtu/ 31 Agustus 2019
Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : **Dr. Darmanto, M.Ed**

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama : **Prof.Dr.Aries Djaenuri, M.A**

Pembimbing I

Nama : **Dr. Warjio, M.A.**

Pembimbing II

Nama : **Dr. Ari Juliana, M.A.**

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oleh karena berkat dan kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi dan dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam Mewujudkan Perencanaan Strategik (Visi dan Misi) Kabupaten Samosir” dengan baik. Sungguh tidak mudah menyelesaikannya diantara aktivitas penulis sebagai ASN dan sebagai ibu rumah tangga.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dosen Pascasarjana Jurusan Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga dapat menyelesaikan studi, baik dosen yang bertemu secara tatap muka maupun dosen yang membimbing dalam tutorial online. Kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Secara khusus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Warjio, MA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ari Juliana, MA selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya Bapak dan Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Penguji Ahli, Prof Dr. Aries Djaenuri, MA dan Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik, Bapak Dr. Darmanto, M.Ed atas kebaikan hatinya dalam proses ujian sidang.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada suami, anak – anak, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung saya dalam segala hal. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat kepada semua pihak.

Hormat saya,

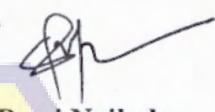


Siska Dewi Naibaho
NIM. 500627395

RIWAYAT HIDUP

- Nama : Siska Dewi Naibaho
NIM : 500627395
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi bidang minat
Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Lumban Pea/ 14 Mei 1983
- Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SDN No.173739 Pangururan pada Tahun 1995;
- Lulus SLTP di SLTP Negeri 1 Pangururan pada Tahun 1998;
- Lulus SLTA di SMU Neg. 1 Pangururan pada Tahun 2001;
- Lulus S1 di Universitas Negeri Medan Tahun 2006.
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2008 s/d 2012 sebagai Verifikator di DPKAD Kabupaten Samosir;
- Tahun 2012 s.d. 2013 sebagai Kasubbag. POPR Setdakab Samosir;
- Tahun 2013 s.d. 2017 sebagai Kasubbag. Keuangan Setdakab Samosir;
- Tahun 2017 s.d. saat ini sebagai Kasubbag. Keuangan, Kepegawaian dan TU Setdakab Samosir.

Medan, September 2019

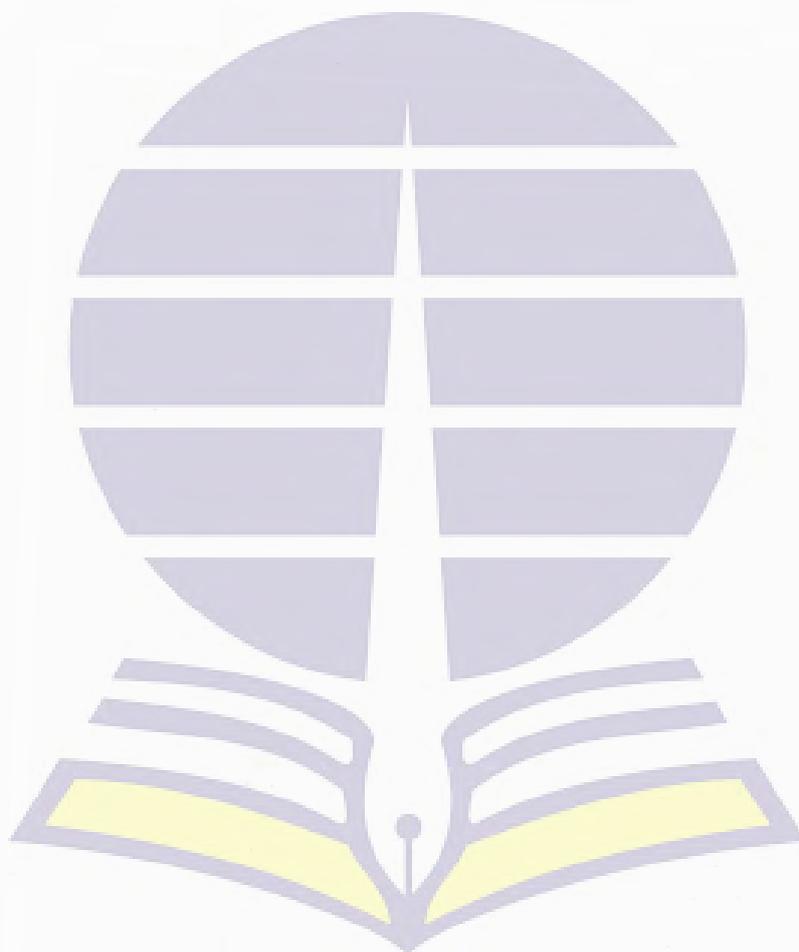


Siska Dewi Naibaho
NIM.500627395

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Persetujuan TAPM	ii
Pengesahan Hasil Ujian Sidang	iii
Kata Pengantar	iv
Riwayat Hidup	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Transkrip wawancara.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	46
B. Subjek Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	49
E. Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah.....	52
B. Visi dan Misi Kabupaten Samosir dan	

Visi Misi Desa Saitnihuta	57
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	61
D. Penggunaan Dana Desa	65
E. Pembahasan Hasil Penelitian	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	x



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengembangan suatu wilayah tidak terlepas dari upaya pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah agar pembangunan di segala bidang terlaksana. Oleh karena terbatasnya sumber daya dan dana, maka pemerintah, baik pusat maupun daerah menetapkan skala prioritas dalam pembangunan.

Kabupaten Samosir, merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan danau toba, dimana kawasan danau toba telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 – 2025. Wilayah Kabupaten Samosir yang sebagian besar daratannya di tengah danau toba dan di pinggiran danau toba memiliki keindahan alam yang dapat diandalkan dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, adat dan budaya masyarakat juga memiliki daya tarik tersendiri. Kondisi inilah yang yang mendasari pemerintah merumuskan visi Kabupaten Samosir tahun 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berbunyi “ Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian” .

Masyarakat Kabupaten Samosir adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Samosir umumnya adalah petani, peternak, pedagang dan pelaku usaha di bidang pariwisata. Kondisi ini didukung oleh keadaan tanah Samosir yang merupakan tanah pertanian dan banyak terdapat obyek wisata yang menarik. Fakta sejarah mengatakan bahwa Pulau Samosir yang berada di tengah danau toba terbentuk akibat letusan gunung berapi sekitar 74.000 tahun yang lalu dan Pulau Samosir dikatakan sebagai asal muasal orang batak. Hal ini menjadikan Samosir sebagai Kabupaten yang unik dan istimewa. Sangat tepat jika Kabupaten Samosir menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan utama dan pertanian sebagai sektor andalan kedua.

Untuk mencapai visi dan misinya, Pemerintah Samosir menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional. Pelaksanaan setiap kegiatan untuk mewujudkan visi tentunya memerlukan dana. Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan berbagai kegiatan yang dananya bersumber dari APBD. Dana APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah data realisasi APBD Kabupaten Samosir selama 5 tahun berturut – turut dari tahun 2013 – 2017.

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Samsir 2013 - 2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain – Lain Pendapatan yang sah	Jumlah Pendapatan
1	2013	26.661.345.261,12	441.138.043.294,-	61.981.466.745,-	529.780.855.300,12
2	2014	36.849.574.656,55	504.939.833.651,-	71.904.095.269,-	613.693.503.576,55
3	2015	34.298.410.262,00	643.652.048.256,-	542.369.500,-	678.492.828.018,00
4	2016	39.268.200.307,28	733.253.158.164,-	6.541.976.000,-	779.063.334.471,28
5	2017	72.228.748.254,50	750.898.958.311,-	674.493.050,-	823.802.199.615,50

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Samsir 2013 - 2017

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Samsir berasal dari Dana Perimbangan dari pusat. Komponen dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sejak tahun 2015 terdapat transfer dana desa.

Pada sisi belanja, penggunaan dana APBD dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Realisasi Belanja APBD Kabupaten Samsir 2013 - 2017

No	Tahun	Belanja Operasi			Belanja Modal
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan & BTT	
1	2013	255.611.672.248,00	81.382.725.142,50	22.793.807.892,00	162.439.730.267,00
2	2014	274.456.578.826,00	103.200.302.510,00	27.528.552.001,00	167.757.876.129,00
3	2015	282.119.510.380,00	135.561.430.348,00	84.252.040.579,00	181.611.818.940,00
4	2016	292.371.306.420,00	155.514.858.180,63	127.270.041.302,00	235.234.249.681,79
5	2017	293.817.452.257,00	186.949.345.262,55	159.079.514.552,00	224.240.859.126,61

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Samsir 2013 - 2017

Dari data belanja diatas, dapat dilihat, bahwa untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas di Kabupaten Samosir, per tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan 2017 maksimal sebesar belanja modal. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Samosir membutuhkan polesan pembangunan. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, proses pembangunan akan sangat lambat berjalan dan tidak semua wilayah dapat tersentuh secara bersama – sama. Secara pasti, pembangunan daerah diprioritaskan bagi wilayah – wilayah yang menjadi kawasan wisata unggulan yang telah ditetapkan.

Secara geografis, seluruh wilayah di Kabupaten Samosir memiliki potensi wisata yang menarik. Hanya saja, mengingat dana yang sangat terbatas tidaklah memungkinkan untuk sekaligus mengembangkan dan membenahi wilayah – wilayah untuk meningkatkan daya tarik wisata. Dengan sembilan wilayah kecamatan terdapat 128 desa dan 6 kelurahan, tentunya pemerintah merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan sesuai skala prioritas.

Perwujudan penghormatan dan pengakuan Negara terhadap desa dan keberagaman yang dimilikinya tertuang dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program Pemerintah Republik Indonesia saat ini yang dikenal dengan **nawacita** merupakan angin segar bagi pembangunan daerah pinggiran dan pedesaan. Hal ini sesuai dengan butir nawa cita ketiga “upaya membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan”, desa – desa di seluruh Indonesia semakin diberdayakan menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai kepada seluruh

desa agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dana desa dimaksudkan agar desa dapat memprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa bertujuan untuk : 1) peningkatan pelayanan publik di desa; 2)mengentaskan kemiskinan; 3)memajukan perekonomian desa; 4)mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Langkah yang dilakukan antara lain melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawacita) yang berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan normal, RPJMN juga dapat menjadi acuan Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Dalam penggunaan dana desa, harus memenuhi keenam prinsip sesuai dengan buku pintar dana desa, yaitu:

1. Keadilan, yang bermakna mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Kewenangan desa, yakni mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
4. Partisipatif, berarti mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa memiliki maksud berbasis sumber daya desa memiliki maksud mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;
6. Tipologi desa, artinya mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan penelitian Jamaluddin, dkk (2018) yang menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan dikatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah, dan program

pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Seharusnya program pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 79 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: *“(1)Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.”* Selanjutnya dalam pasal 80 ayat 1 dikatakan bahwa *Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.*

Dengan merujuk pasal 79 dan 80 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 diatas, sudah seharusnya program pembangunan desa sinkron dengan kebijakan pembangunan kabupaten atau RPJMD Kabupaten, dan perencanaan pembangunan desa merupakan sumber masukan bagi perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pembangunan desa bukan hanya ditangan aparatur desa, akan tetapi harus melibatkan masyarakat atau disebut dengan perencanaan partisipatif. Untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa wajib dilakukan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrebangdes). Namun, seringkali terjadi partisipasi yang dilakukan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi amanat peraturan perundang – undangan. Masyarakat yang diundang merupakan perwakilan organisasi di desa tersebut yang kadang – kadang tidak menguasai kebutuhan masyarakat yang diwakilinya, padahal, informasi mengenai kebutuhan masyarakat sangatlah penting dalam membuat kebijakan mengenai rencana penggunaan dana yang ada. Etwiory, SH (2013) dalam thesisnya menyimpulkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam musrembang di Kabupaten Maluku Tenggara bukan merupakan partisipasi yang sesungguhnya, dimana pada tingkat desa merupakan partisipasi inisiatif, di tingkat kecamatan partisipasi hampa, dan di tingkat kabupaten merupakan partisipasi yang bersifat konsultatif.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mewujudkan masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian seharusnya diacu oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Samosir, mengingat secara keseluruhan wilayah Kabupaten Samosir memiliki potensi wisata yang besar didukung keindahan alam yang mengagumkan. Sebaliknya, untuk pengembangan pertanian tidak semua wilayah dapat dilakukan. Desa Saitnihuta, salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangururan, 100 % areal persawahan mengandalkan hujan untuk pengairan. Saat ini sektor pariwisata telah terbukti menjadi penggerak ekonomi paling ampuh di berbagai belahan dunia. Singapura, Malaysia, Thailand, dan banyak negara lainnya berlomba – lomba memajukan pariwisata. Dibandingkan dengan negara – negara tersebut, Indonesia lebih unggul dalam hal *tourism branding* dan destinasi dengan berbagai penghargaan yang diraih Indonesia. Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menurut World Economy Forum (WEF) menunjukkan perkembangan menggembirakan, dimana peringkat Indonesia naik 8 poin dari 50 di 2015, ke peringkat 42 pada tahun 2017. Dalam laman detikfinance pada hari Selasa, 17 Oktober 2017 pukul 14.05 WIB diberitakan bahwa devisa dari sektor pariwisata pada 2016 sebesar US\$ 13,568 miliar berada di posisi kedua setelah CPO US\$ 15,965 miliar setelah pada tahun 2015 devisa dari sektor pariwisata pada posisi keempat

sebesar US\$ 12,225 miliar. Sektor pariwisata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Selanjutnya dalam laman www.liputan6.com pada tanggal 7 Januari 2018 dengan judul “Sektor Pariwisata Jadi Investasi Uggulan di 2018”, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam kesempatan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pariwisata dianggap punya keunggulan mengingat mayoritas berada di sektor jasa. Pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat. Hasilnya cepat, dampak lapangan kerjanya cepat, dan penghasilannya cepat, devisanya jalan. Selanjutnya menteri pariwisata Arief Yahya juga mengatakan bahwa pariwisata akan mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, juga kesenjangan dengan cepat dan tepat.

Ucapan Kepala BKPM dan Menteri Pariwisata telah terbukti kebenarannya. Banyak desa – desa di Indonesia yang dulunya miskin kini sudah sejahtera karena mengembangkan sektor pariwisata. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. **Desa Pemuteran, Buleleng.** Mata pencaharian mayoritas penduduk adalah nelayan. Sebelum menjadi desa wisata, penduduk desa sering merusak terumbu karang. Mereka bersama – sama melakukan perbaikan melalui serangkaian pengenalan dan edukasi sehingga masyarakat desa melindungi terumbu karang dan memperbaiki kawasan desa sedemikian rupa dan akhirnya tercipta desa wisata yang nyaman dan mendapat puluhan

- penghargaan dibidang pariwisata. (<https://travel.detik.com/travel-news/d-2819060/desa-pemuteran-bukti-pariwisata-bikin-rakyat-sejahtera>)
2. Dusun Grendel, Desa Punong, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Warganya banyak yang kurang mampu. Sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dan memiliki pendapatan yang kurang. Daerah Grendel pun masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Kemudian warga setempat berinisiatif membuka tempat wisata alam yang dapat menarik masyarakat untuk berkunjung. Bukit Grendel, lokasi wisata baru, dibangun di atas lahan hutan milik Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dengan masyarakat sebagai pihak pengelola. Warga membangun jalan dan fasilitas secara mandiri, dan dibuka pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Bukit Grendel sudah populer. Jumlah wisatawan per hari hingga 100 orang dan pada hari libur bisa mencapai 1.000 orang. Seiring berkembangnya pariwisata di daerah ini, keadaan ekonomi masyarakat semakin membaik. (www.tribunnews.com/regional/2017/11/02/dusun-grendel-dulu-menjadi-desa-tertinggal-sekarang-maju Kamis, 2 November 2017)
 3. Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Sebagaimana diberitakan dalam laman kompas.com tanggal 27 September 2016, Kreativitas aparat desa mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan pemandian tua Dari Rp 5.000.000/tahun menjadi Rp 6.500.000.000,-/tahun. Pemandian tua yang tidak terurus di desa tersebut kemudian dibenahi dan kini menjadi salah satu destinasi menarik di Klaten yang sekarang dikenal dengan nama Umbul Ponggok. Pemandian tua itu dirapikan, dikasih sofa, motor, kuda lumping, ikan, dikasih kamera di

dalam air sehingga pengunjung bisa berenang sambil selfie. Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4. Desa Cibuntu Kuningan merupakan salah satu desa wisata terbaik di Indonesia bahkan urutan kelima tingkat ASEAN pada tahun 2016 untuk bidang *homestay*. Desa Cibuntu memiliki puluhan homestay yang bersih. Terletak di lereng gunung Ciremai, Desa ini udaranya sejuk, terdapat situs peninggalan jaman dulu dan memiliki sumber air. Menurut Kepala Desa, jumlah penduduk desa hanya berkisar seribuan orang, namun masyarakatnya kompak untuk mewujudkan Cibuntu menjadi desa wisata. Gagasan mengenai desa wisata berawal dari penelitian mahasiswa yang menyimpulkan bahwa Cibuntu memiliki potensi besar dalam bidang kepariwisataan pada tahun 2011. Kemudian mereka menyikapi hal tersebut dengan mulai menata perkampungan, dimana masyarakat yang memiliki domba dipisahkan dan disatukan di lahan tersendiri sehingga tidak ada kandang domba di perkampungan (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3752876> Minggu, 3 Desember 2017).

Berdasarkan kenyataan yang telah terjadi di beberapa desa sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah banyak desa yang dulunya miskin dan mengandalkan pertanian kini menjadi sejahtera karena pariwisata. Tentunya persoalan yang dihadapi Kabupaten Samosir dan khususnya Desa Saitnihuta pernah juga dialami daerah lain. Akan tetapi, dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dan meningkatkan potensi wisata yang dimiliki, daerah lain bisa bangkit dan mengalami peningkatan ekonomi yang pesat.

Desa Saitnihuta, adalah salah satu dari 25 desa yang ada di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas wilayah administrasi 250 hektar, berada 50,37 meter diatas permukaan laut dengan jumlah penduduk 897 jiwa sesuai data Profil Desa Desa Saitnihuta Tahun 2017. Terletak sekitar 4 km dari ibukota kecamatan, Pangururan, Desa Saitnihuta memiliki wilayah dataran rendah, tanah berbukit, dan juga tepian danau. Wilayah Desa Saitnihuta menyajikan pemandangan alam Samosir yang indah. Di wilayah ini terpampang jelas gunung pusuk buhit dan daerah aek rangat yang khas dengan area belerang, sehingga kelihatan seperti daerah switzerland yang dipenuhi salju. Selain itu, destinasi wisata andalan di Kabupaten Samosir khususnya di Kecamatan Pangururan hanya berjarak paling jauh 6 km dari desa Saitnihuta, seperti Pemandian Air Panas (Hotspring), dan Kawasan Pasir Putih Parbaba. Lahan pertanian di wilayah ini masih mengandalkan curah hujan untuk mengairi persawahan. Dari total 31 hektar luas tanah sawah, seluruhnya merupakan sawah tadah hujan. Ketika musim kemarau tiba, tidak ada petani yang menggarap sawah dan lahan – lahan dibiarkan kosong. Pada dasarnya lahan persawahan digunakan untuk menanam padi. Biasanya, musim tanam padi dilakukan pada bulan juni dan bulan desember. Namun, beberapa tahun terakhir ini curah hujan sangat minim sehingga musim tanam hanya dilakukan pada bulan desember saja. Tentunya hal ini bisa berakibat buruk bagi perekonomian masyarakat. Pendapatan masyarakat menurun, angka putus sekolah bertambah dan tingkat pengangguran akan meningkat.

Pertanian di Desa Saitnihuta dilakukan secara tradisional, dimana ayah/ ibu sebagai pemilik sekaligus pekerja dibantu anak setelah pulang

sekolah. Sawah yang dikelola adalah sawah milik sendiri/ warisan, tetapi ada juga yang menyewa lahan milik orang lain untuk bertani. Sesuai dengan data potensi desa 2017 dari 221 kepala keluarga terdapat 214 keluarga petani, dimana jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian sebanyak 149 keluarga dan yang tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 65 keluarga. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, petani enggan menggunakan pompa air untuk mengairi sawah mereka karena mereka tidak cukup modal dan jarak sawah dari danau yang cukup jauh membuat mesin pompa air tidak efektif. Beberapa tahun yang lalu, PNPM Mandiri Perdesaan membangun pompa air di dekat danau yang bertujuan agar dapat mengairi sawah di desa Saitnihuta, akan tetapi pompa air tersebut hanya dapat mengairi sawah – sawah yang posisinya sangat dekat dengan pompa tersebut. Saat ini, sudah banyak lahan yang dulunya merupakan persawahan berubah fungsi menjadi perumahan. Hal ini disebabkan sawah – sawah sudah tidak lagi produktif . Jika hal ini terus menerus terjadi, dikhawatirkan meningkatnya angka pengangguran dan dalam jangka panjang, jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Berangkat dari visi dan misi kabupaten Samosir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Terwujudnya masyarakat samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian”, maka desa sait nihuta sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Samosir, diarahkan untuk pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata. Namun, mengingat bahwa kondisi pertanian di wilayah desa

sait nihuta tidak memberikan hasil yang baik karena kondisi cuaca serta alih lahan pertanian menjadi permukiman menyebabkan penduduk kehilangan pekerjaan dan dalam jangka panjang dapat memicu kemiskinan, maka sebaiknya diarahkan untuk pengembangan pariwisata.

Untuk mengembangkan pariwisata di Desa Saitnihuta memang bukanlah perkara mudah. Masih minimnya infrastruktur sebagai akses utama menjadi kendala yang paling besar. Membutuhkan dana yang cukup besar untuk membenahi infrastuktur. Namun, desa saitnihuta harus berinovasi mengingat sektor pertanian tidak terlalu menjanjikan. Satu – satunya yang memiliki potensi besar adalah sektor pariwisata. Memang saat ini, desa saitnihuta belum ditetapkan sebagai desa pariwisata. Akan tetapi, potensi alam yang dimiliki sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Posisinya yang tidak jauh dari pusat kota pangururan menjadi nilai tambah dalam pengembangan potensi wisata.

Berdasarkan pengamatan peneliti, partisipasi masyarakat desa saitnihuta sudah mengarah untuk pengembangan pariwisata. Hal ini terlihat dari pembangunan jalan desa yang dilakukan dimana ukuran lebar jalan sudah 4 meter sementara desa – desa sekitar lebar jalan adalah 3 meter (sesuai ukuran maksimal jalan usaha tani). Saat ini penggunaan dana desa digunakan untuk perbaikan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan yang dialami selama ini.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana masyarakat desa saitnihuta berpartisipasi dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa dan

kaitannya untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten samosir dengan fokus yang bertemakan : **“Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir”**.

Ada beberapa pokok permasalahan dalam pembahasan mengenai partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik yaitu:

1. Keterbatasan dana tingkat kabupaten perlu didorong melalui partisipasi, baik partisipasi mengefektifkan dana desa maupun partisipasi dalam investasi.
2. Kondisi pertanian yang kurang baik perlu disiasati, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perubahan lapangan kerja ke sektor bukan pertanian atau intensifikasi pertanian (lahan sempit perubahan fungsi) maka pertanian yang memberi nilai tambah pada sektor lainnya.
3. Untuk menjaga kemiskinan jangka panjang maka dibutuhkan strategi pembukaan lapangan kerja baru bukan pertanian. Pilihan utamanya tentu dalam bidang pariwisata.
4. Partisipasi masyarakat ini diarahkan dalam mendukung pariwisata, maka masyarakat terlibat langsung baik dari sisi perencanaan penggunaan maupun untuk investasi langsung.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Saitnihuta dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa dan kaitannya untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat desa Saitnihuta dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi pemerintah) di Kabupaten Samosir.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain mengenai partisipasi masyarakat untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi pemerintah daerah) khususnya mengenai arah penggunaan dana desa dan kaitannya dengan visi misi daerah.
2. Dari segi praktisi, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Meskipun demikian, penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis ketahui adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Coce Lily Etwiory, SH, Tahun 2013 yang dimuat dalam Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data menggunakan teknik wawancara. Narasumber yang diwawancarai adalah staf Bappeda Maluku Tenggara, Staf BPM Pemdes Maluku Tenggara, Camat Cei Kecil, Lurah Ohoijang Watdek, Kepala Desa Ngabup, Kepala Desa Kelanit, unsur masyarakat, delegasi kelurahan dan kecamatan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bervariasi sesuai tingkatan penyelenggaraan, dimana pada tingkat kecamatan partisipasi hampa dan tingkat kabupaten merupakan partisipasi konsultatif. Penelitian diatas

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat desa Saitnihuta dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir.

2. **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara** oleh Akbar Putra Siregar dan Robert Tua Siregar yang dimuat dalam *Jurnal Regional Planning* Vol. 4 No. 2 Edisi Agustus 2015. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun; apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat; dan upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan Tanah Jawa untuk mengatasi hambatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif deskriptif dengan narasumber masyarakat kecamatan Tanah Jawa kabupaten Simalungun. Penelitian ini menitikberatkan partisipasi masyarakat hanya dalam proses perencanaan saja (pelaksanaan musrembang). Tentunya hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang menitikberatkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa dan kaitannya untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir.
3. **Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah** oleh Yanhar Jamaluddin, dkk dalam *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol. 6 No. 1 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak member dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan untuk melihat arah penggunaan dana desa dan kaitannya untuk mewujudkan perencanaan strategik. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, dkk tidak menetapkan sebuah wilayah untuk diteliti secara mendalam.

Secara ringkas, penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Keterangan
1	Coce Lily Etwiory, SH (2013)	Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara	Metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bervariasi sesuai tingkatan penyelenggaraan, dimana pada tingkat kecamatan partisipasi hampa dan tingkat kabupaten merupakan partisipasi konsultatif.
Perbedaannya penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat desa Saitnihuta dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir.			
2	Akbar Putra Siregar dan Robert Tua Siregar (2015)	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dacrah di Kecamatan	Penelitian ini menitikberatkan partisipasi masyarakat hanya dalam proses perencanaan saja (pelaksanaan musrembang). Bersifat kualitatif deskriptif

		Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	
	Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, arah penggunaan dana desa dan kaitannya untuk mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir.		
3	Yanhar Jamaluddin, dkk (2018)	Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah	Menganalisis dampak pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak member dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.
	Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, dkk tidak menetapkan sebuah wilayah untuk diteliti secara mendalam sedangkan penelitian ini dengan menganalisis arah penggunaan dana desa Saitnihuta dengan visi misi Kabupaten Samosir		

Sumber : Hasil kajian Penulis (2018)

B. Kajian Teori

I. *Partisipasi Masyarakat*

Philipus M. Hadjon (1997: 4-5) dalam Griadhi dan Utari (2008) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Artinya, tanpa keterbukaan pemerintahan mustahil masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan – kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa keterbukaan, baik “openheid” maupun “openbaarheid” sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.

Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.

Soerjono Soekanto (1993: 355) mendefinisikan partisipasi sebagai setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi dapat berupa partisipasi sosial, yaitu derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan partisipasi politik.

Ndraha dalam Siregar dan Siregar (2015) memberikan pengertian partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan mental emosional atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong agar yang bersangkutan atas kehendak sendiri menurut kemauan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Slamet (1993:93), bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan disebut swadaya masyarakat, berupa (1) tenaga; dan (2) uang/ materi.

Untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat benar – benar terwujud, maka perlu diperhatikan dimensi – dimensi partisipasi sebagaimana dikatakan oleh Cohen dan Uphoff (1997:7) :

Dimensi partisipasi meliputi apa, siapa dan bagaimana partisipasi itu dilaksanakan. Dimensi siapa (*who participation*) mengidentifikasi orang – orang yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yang meliputi 4 (empat) karakteristik, yaitu:

- a. Masyarakat setempat;
- b. Pemimpin lokal (orang yang dipilih atau ditunjuk secara formal atau tidak, tradisional atau modern yang menduduki tempat terhormat di masyarakat setempat dimana peran mereka diakui sebagai juru bicara dari masyarakat atau kelompok tertentu);
- c. Aparatur pemerintah;

d. Personel asing yang terdiri dari lembaga donor, lembaga internasional, misi gereja atau lembaga sukarela, warga imigran Negara lain).

Dimensi apa (*what participation*) menjelaskan tentang kegiatan dalam hal apa partisipasi yang dilakukan. Adapun jenis partisipasi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembangunan adalah terdiri dari:

- a. Partisipasi dalam membuat keputusan (*participation in decision making*);
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*);
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*);
- d. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Dimensi *how participation* menjelaskan bagaimana terjadinya partisipasi yang dapat dilihat dari tujuh karakteristik yaitu (1) inisiatif (*initiative*), menunjukkan arah datangnya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi; (2) dorongan (*inducements*) menunjukkan motivasi yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; (3) *structure* menunjukkan mekanisme partisipasi dilakukan melalui struktur organisasi individu; (4) *channel*, menunjukkan mekanisme partisipasi yang dilakukan melalui cara perwakilan atau secara langsung; (5) *duration* menunjukkan jangka waktu partisipasi secara sesaat atau terus menerus; (6) *scope*, menunjukkan mekanisme partisipasi pada seluruh kegiatan pembangunan atau pada saat tahap tertentu saja dari kegiatan pembangunan; (7) *empowerment*, seberapa besar kewenangan yang diberikan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Ndraha (1985 : 103-104) mengatakan bahwa partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan dapat dibagi berikut :

- a) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai titik awal perubahan sosial.
- b) Partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengabaikan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- c) Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan;
- d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional;
- e) Partisipasi dalam menerima,
- f) Memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan;
- g) Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan,

Dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, menerima, memelihara dan

menilai, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tahapan Partisipasi dalam Pembangunan

Gandhi (dalam Bintoro Tjokroamidjojo, 2000: 72) menyebutkan bahwa "Pembangunan merupakan sebuah konsep normatif dalam menentukan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia". Bintoro Tjokroamidjojo, (2000:73) juga mengatakan bahwa "pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional." Defenisi pembangunan ditegaskan oleh Bintarto, R. (2004: 421) yang menyatakan bahwa "*major societal change from one state of national being to another, more valued, state,*" dapat diartikan sebagai perubahan besar masyarakat dalam sebuah negara menjadi lebih bernilai dan dapat dihargai. Memperkuat pandangan tersebut, Siagian (2008), mengemukakan bahwa "pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*)". Dari berbagai defenisi mengenai pembangunan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian pembangunan, yakni segala bentuk upaya yang dilaksanakan secara sadar agar terjadi perubahan dan pertumbuhan di segala bidang ke arah yang lebih baik, agar tercapai tujuan bangsa dan negara.

Pada dasarnya pembangunan daerah bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional. Salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah. Berdasarkan teori Ndraha (1985:59), terdapat tiga hasil yang diharapkan dari sasaran umum pembangunan daerah di Indonesia pembangunan, yaitu “membaiknya kondisi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah, tergeraknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan yang terakhir tumbuhnya kemampuan daerah untuk berkembang secara mandiri”.

Dalam pelaksanaan pembangunan, ada berbagai tipe program pembangunan sebagaimana dalam teori yang disebutkan oleh Sukanto (2004:179).

Sukanto membagi program pembangunan daerah dalam dua tipe, yaitu *tipe pertama*, adalah jenis program pembangunan masyarakat yang dikoordinasikan oleh suatu departemen dan kementerian pemerintah yang khusus bertanggung jawab atas masalah pembangunan masyarakat. Departemen yang bersangkutan memperkerjakan tenaga-tenaga profesional di bidang pembangunan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dalam mendorong serta membantu segala jenis kegiatan komunitas setempat di seluruh daerah. Artinya, pembangunan dilaksanakan dan ditanggungjawab 100% oleh sebuah departemen.

Tipe kedua, ialah kegiatan pembangunan masyarakat melibatkan proyek khusus yang hanya mencakup suatu daerah yang amat terbatas. Proyek-proyek semacam ini cenderung memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang normal dilaksanakan departemen pembangunan masyarakat dan diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan masalah yang terjadi sebagai jawaban terhadap adanya tuntutan komunitas setempat. Besarnya bantuan luar sering lebih besar daripada bentuk kegiatan pembangunan masyarakat yang lain, namun ada juga proyek yang besar-besaran dilaksanakan atas inisiatif komunitas itu sendiri dan hanya menerima sedikit sekali bantuan dari luar, bahkan sama sekali tidak. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan memungkinkan adanya pendekatan terpadu bukan hanya keterlibatan satu sektor.

Menurut Ndraha (1985:59), sasaran pembangunan di Indonesia diarahkan pada tiga sasaran atau hasil yang diharapkan yaitu “membaiknya kondisi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah,

tergeraknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tumbuhnya kemampuan daerah untuk berkembang secara mandiri”.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. Sedini mungkin, sejak penyusunan perencanaan, masyarakat sudah semestinya terlibat. Siagian (2004 : 21) menyatakan bahwa : pembangunan untuk masyarakat akan terwujud dengan cara atau melalui dan bersama rakyat sendiri. Ide atau rencana dibawa dalam rapat dan rakyat diberitahu serta diajak untuk berdiskusi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan (proses pembuatan keputusan) diuraikan pula oleh Cohen dan Uphoff (1987 : 28) yang menyatakan bahwa “partisipasi dalam pembuatan keputusan atau dalam perencanaan pembangunan mencakup keterlibatan dalam pertemuan, diskusi, voting mungkin juga lobbying, menyatakan keluhan-keluhan, ikut berkontribusi dalam organisasi-organisasi dan bahkan mungkin mencakup kegiatan demonstrasi atau oposisi”.

Berdasarkan uraian diatas, jelas kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan secara nyata meliputi partisipasi dalam perumusan pekerjaan-pekerjaan kemudian memilih pekerjaan mana yang cocok sesuai tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, sehingga dapat berupa usulan, tanggapan, saran dan penetapan pilihan, yang disampaikan dalam rapat-rapat daerah ketika menyusun perencanaan. Oleh karena itu, pada prinsipnya keberhasilan pembangunan tergantung pada adanya keterlibatan aktif masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat

terwujud jika kepemimpinan kepala daerah mampu merangsang partisipasi aktif masyarakat.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam hubungan ini Cohen dan Uphoff (1987 : 90) menegaskan: *participation in implementation deals with : (a) Resource contribution, (b) Participation in administration and coordination, and enlistment in programs.* (partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu akan meliputi (a) partisipasi dalam sumber daya, (b) Partisipasi dalam administrasi dan kordinasi dan (c) Partisipasi dan pendaftaran dalam program).

Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Ndraha (1987:49) bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi: (a) Ikut serta dalam mengarahkan daya dan dana, (b) ikut serta dalam administrasi dan koordinasi, (c) dan ikut serta dalam penjabaran ke dalam program. Sebagaimana yang dimaksud sebagai partisipasi dalam memikul beban pembangunan termasuk dalam pengertian ini. Terutama beban berupa material, bahan, tenaga, waktu, tanah, alat dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Koentjaraningrat (1997 : 15) mengemukakan bahwa “dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan rakyat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau harus kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus biasanya bersifat fisik”.

5. Partisipasi Masyarakat Menerima Hasil Pembangunan

Partisipasi pada katagori ini dimaksudkan sebagai partisipasi dalam

menerima *output* atau *outcome*, keluaran yang wujudnya dapat bersifat non fisik ataupun fisik. Pendapat ilmuwan yang membahas mengenai partisipasi jenis ini yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Cohen dan Uphoff dan Ndraha. Cohen dan Uphoff dalam *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*, menggolongkan jenis partisipasi dalam menerima hasil pembangunan sebagai "*participation in benefit*". Partisipasi dalam manfaat ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni :

- a. Manfaat materil, yaitu manfaat yang diterima secara pribadi. Misalnya peningkatan konsumsi, pendapatan, atau aset.
- b. Manfaat sosial, yang berkaitan dengan barang publik. Seperti fasilitas sekolah (pendidikan), klinik kesehatan, infrastruktur yang lebih baik, sistem penyediaan air bersih serta fasilitas perumahan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
- c. Manfaat pribadi, yaitu manfaat yang sangat diinginkan meskipun seringkali tidak diperoleh secara individual, tetapi lebih kepada anggota kelompok, karena menyangkut kekuatan sosial dan politik.

Sementara Ndraha, (1987:50) mengemukakan bahwa partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan diartikan sebagai:

- a. Penerimaan dari tiap hasil pembangunan sebagai seolah-olah milik sendiri;
- b. Pemanfaatan/ penggunaan setiap hasil pembangunan;
- c. Mengusahakan hasil pembangunan;
- d. Melakukan pemeliharaan rutin dan sistematis agar dapat dipergunakan secara berkelanjutan;

- e. Melakukan pengaturan dalam menggunakan, memanfaatkan, mengusahakan, dan melakukan pengamanan;
- f. Mengembangkannya.

Jadi dalam partisipasi katagori ini, wujudnya dapat berupa keterlibatan dalam menerima setiap hasil pembangunan sebagai pemilik, dan mempergunakan hasil – hasil pembangunan, melakukan perawatan dan mengusahakan, secara rutin memelihara, mengatur penggunaannya dan mengembangkannya.

6. *Partisipasi Masyarakat dalam Penilaian (Evaluasi)*

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penilaian (pegawasan) pembangunan, Bintoro Tjokroamidjojo (2000 : 221) berpendapat bahwa :

Di dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, maka pengawasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formal, tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan (termaksud golongan cendekiawan, mahasiswa, buruh, wanita) kelompok-kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat atau seorang warga negara biasa dapat turut mengawasi, sehingga pelaksanaan administrasi Negara lebih dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Untuk mengevaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian, atau evaluasi yang dilakukan dengan secara langsung ataupun berupa pengutaraan pendapat atau kritik yang ditunjukkan kepada kebaikan atau keburukan suatu kebijaksanaan, rencana atau program pemerintah. Mengkaji bahasan tentang partisipasi masyarakat dalam penilaian, Ndraha (1987:51) menyimpulkan, Pendapat Mosha dan Cohen dan Uphoff, yang menyatakan bahwa Keluaran pembangunan, baik berupa fisik maupun non fisik, perlu mendapat penilaian

dari masyarakat selaku konsumen untuk menilai sejauh mana suatu keluaran telah memenuhi kebutuhan yang sejak lama dirasakan oleh masyarakat.

Dukungan partisipasi masyarakat dalam penilaian pembangunan adalah keterlibatan dalam mengawasi jalannya pembangunan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak dan, apakah pembangunan tersebut telah mencerminkan kepentingan masyarakat. Beranjak dari berbagai pendapat itu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi secara operasional berupa kontribusi di dalam memberikan dana, tenaga, bahan dan yang sejenis dengan itu.

7. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi*

Bunaser (1999 : 54) mengatakan bahwa manajemen partisipatif dapat dipandang sebagai alat yang membolehkan manajemen untuk berpartisipasi dengan lebih bebas dan pembuatan keputusan serta juga alat untuk memperluas pengaruh eselon yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Persoalan utama dalam pandangan ini ialah apakah manajemen partisipatif merupakan alat atau proses itu sendiri. Jikalau kita ingin mengurangi partisipasi kepada alat belaka, maka dapat menyebabkan bahaya bila digunakan untuk maksud yang manipulatif. Manajemen partisipatif tentunya lebih dari sekedar alat. Ia bahkan merupakan cara hidup dalam beberapa organisasi.

Sering pendekatan partisipatif gagal memberikan hasil yang diharapkan atau bahkan bisa menghasilkan sikap-sikap negatif di pihak peserta. Mengapa manajemen partisipatif tidak memberikan hasil-hasil yang positif. Untuk menjawab pertanyaan ini, kondisi-kondisi tertentu sangat

diperlukan sebelum kita mempraktekkan manajemen partisipatif. Praktis melakukan kesalahan manakala mereka membuat asumsi terselubung tentang kondisi-kondisi tersebut dan masyarakat dalam organisasi. Cemea, Michael M. (2007:100) menyebutkan hal-hal berikut sebagai prasyarat bagi partisipasi dalam organisasi:

- 1) Kapabilitas masyarakat untuk secara psikologis terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk partisipasi;
- 2) Seberapa baik masyarakat memandang kegiatan-kegiatan partisipatif;
- 3) Ketersediaan waktu bagi partisipasi yang berarti;
- 4) Biaya partisipasi seharusnya tidak melebihi manfaat dari partisipasi tersebut.

Hal yang paling pokok dari partisipasi masyarakat adalah adanya kesadaran anggota masyarakat yang didasarkan pada keterikatan mental anggota kelompok, dalam memberikan sebagian dari tenaga, pikiran dan materi demi pencapaian tujuan bersama. Namun masyarakat memberikan sebagian dari tenaga, pikiran, materi dan waktunya apabila ada manfaat langsung terhadap masyarakat itu sendiri. Ndraha (1985 : 105), menjelaskan bahwa masyarakat akan bersedia dalam berpartisipasi apabila :

- 1) Partisipasi kelompok melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tenga-tengah masyarakat bersangkutan;
- 2) Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat;
- 4) Dalam proses partisipasi itu terjamin kontrol yang dilakukan oleh masyarakat, partisipasi masyarakat ternyata berkurang jikalau mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal penerimaan manfaat dari anggota masyarakat, Ndraha (1990: 105) berpendapat bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan

diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan partisipasi juga ditentukan oleh beberapa unsur penting sebagaimana dikemukakan oleh Sastropetro, Santoso, R.A. (2008: 41) sebagai berikut:

- 1) Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif/berhasil;
- 2) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan untuk pengertian yang menumbuhkan kesadaran;
- 3) Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan yang dipertimbangkan;
- 4) Ethnouisiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain; dan
- 5) Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Di lain pihak, Holdar dan Zakharchenko (2002), juga memberikan gagasan mengenai mekanisme untuk mengatasi permasalahan di atas; yaitu:

- (a) melalui pelatihan dan pendidikan masyarakat, (b) kampanye kesadaran publik; (c) strategi komunikasi; (d) jaringan kerja; (e) membagi pengalaman; (f) kemitraan; (g) ketrampilan manajerial; dan (h) memperkenalkan

sukarelawan. Rogers, Everet dan F Floyd Shoemaker. (2006: 41) telah membuat kesimpulan mengenai faktor-faktor yang biasanya teridentifikasi dalam literatur dan studi kasus-kasus yang dikoneksikan dengan keberhasilan partisipasi masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut mencakup keterlibatan awal, inklusivitas, komunikasi dua arah, informasi dan sumber daya yang memadai, jenis mekanisme tertentu, dan derajat kontrol masyarakat, insentif dan/atau kompensasi, pengalaman komunitas sebelumnya, dan kesepakatan atas tujuan.

Menurut Supriatna, Tjahya (2005: 428), keberhasilan dalam partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama.

“Pertama, keberhasilan partisipasi masyarakat adalah kekuatan transformatif dialog (*transformative power of dialogue*). Jikalau masyarakat dapat terlibat dalam suatu dialog yang otentik di mana semuanya sama-sama diberdayakan dan diinformasikan dan di mana mereka mendengar dan didengar masing-masing dan bila mereka bekerja demi kepentingan semua orang, dengan mengikuti agenda mereka sendiri, maka setiap orang diubah. Masyarakat belajar ide-ide baru dan mereka bisa mengenal bahwa pandangan-pandangan orang lain sah. Mereka juga bisa melihat diri sendiri sebagai orang yang dapat membuat suatu perbedaan.

Kedua, partisipasi masyarakat juga bisa bermanfaat membangun jaringan kerja (*networks*). Satu outcome secara universal selalu disebutkan oleh masyarakat adalah bahwa mereka membangun suatu hubungan profesional dan personal. Mereka datang untuk memahami perspektif orang lain dan dalam banyak kasus membangun kepercayaan. Modal sosial ini diterjemahkan dalam jaringan kerja baru yang mereka dapat dan benar-benar gunakan untuk banyak kasus lain di luar proses partisipasi. Jaringan kerja ini sering berkembang karena masyarakat yang terlibat mempelajari kekuatan proses dan mengirimkan gagasan kepada sesamanya. Akhirnya, proses kerja yang dilakukan secara bersama, berjejaring memberikan kontribusi kepada pembangunan kapasitas kelembangaan (*institutional capacity*), yang merupakan kombinasi dari modal sosial, intelektual, dan politik. Bilamana modal ini bertumbuh-kembang dan menyebar melalui kolaborasi dalam lingkungan-lingkungan yang saling berkaitan dan jaringan kerja, kapasitas sipil (*civic capacity*) dari suatu masyarakat umumnya bertambah dan para peserta menjadi semakin berpengetahuan dan kompeten, dan lebih percaya pada kemampuan mereka untuk melakukan perbedaan.”

8. *Konsep Strategi*

Pengertian strategi sebagaimana didefinisikan David (2006: 16) adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi dalam jumlah yang besar. David juga menegaskan bahwa strategi memengaruhi keberhasilan program organisasi dalam jangka panjang dan berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu

mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi setiap lembaga.

Sedangkan menurut Stephen Robins (2008:6), strategi merupakan sebuah rencana yang memiliki skala besar dan berorientasi masa depan, yang diperlukan untuk dapat melakukan interaksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan/ organisasi. Senada dengan hal tersebut, Glueck dan Jauch (2000: 9) mengungkapkan bahwa strategi adalah “rencana yang disatukan, bersifat luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.

Dari kedua pengertian strategi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah sebuah perencanaan yang sifatnya besar, terintegrasi dan luas, serta berorientasi masa depan sehingga sangat memengaruhi kemajuan organisasi, tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal untuk meraih tujuan organisasi. Berdasarkan kesimpulan ini, ketika strategi dirangkai dengan kata perencanaan menjadi perencanaan strategis, dapat diartikan menjadi sebuah perencanaan yang memiliki skala besar agar tercapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi.

9. *Pengertian Manajemen Strategis*

Banyak literatur yang memberikan defenisi dan pengertian manajemen strategi dengan kalimat yang berbeda. Beberapa diantaranya dikutip dalam penelitian ini, yakni defenisi menurut Hadari Nawawi (2003),

“Manajemen strategi merupakan perencanaan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran organisasi”.

Ada banyak pengertian manajemen strategi, namun, pada dasarnya manajemen strategi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang merupakan satu kesatuan dan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan memengaruhi. Bagian pertama dari sebuah manajemen strategi adalah unsur-unsur perencanaan strategi, terdiri dari visi, misi, dan tujuan serta strategi utama organisasi. Sedangkan bagian kedua adalah unsur perencanaan operasional, tujuan dan sasaran operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, kontrol dan evaluasi, serta umpan balik). Dengan mengacu pada definisi yang ada, menjalankan sebuah manajemen strategi artinya sebuah lembaga diharuskan untuk membuat perencanaan dalam bentuk formulasi bisnis secara matang.

Griffin (2004:226) mengatakan manajemen strategis adalah “cara menanggapi peluang dan tantangan lembaga secara komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif”. Selanjutnya Griffin (2004: 227) mengatakan perencanaan strategi memiliki dimensi *formulating* (membuat), *implementing* (menerapkan) dan *evaluating* (mengevaluasi) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah

organisasi mencapai tujuan- tujuan dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, David (2006) mendefenisikan manajemen strategis sebagai suatu ilmu dan seni untuk memformulasikan , mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi atas keputusan lintas fungsi agar memungkinkan tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagaimana tersirat dalam definisi manajemen strategis, fokus manajemen strategis adalah pada integrasi manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari definisi para ahli di atas diinterpretasikan bahwa manajemen strategis sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu organisasi. Sedangkan perencanaan strategis merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi atau sebuah rangkaian tindakan yang sebelumnya telah ditentukan. Melalui proses perencanaan, disusunlah visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.

Dalam menyusun strategi, ada 10 (sepuluh) hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. objektif. Angan-angan sendiri tidak memiliki tempat di dalam bangunan sebuah bisnis. Hal mendasar adalah kejujuran, penilaian yang tenang

dari kekuatan dan kelemahan perusahaan dan keahlian bisnis serta manajemennya;

2. Membuat terfokus dan sederhana;
3. Memiliki fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan perusahaan;
4. Membuat pengembangan rencana pemasaran;
5. Melakukan manajemen secara efektif terhadap tenaga kerja ;
6. Melakukan pembukuan keuangan secara jelas;
7. Pengeluaran dilakukan secara efektif dan efisien;
8. Berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha;
9. Memahami seluruh fase bisnis untuk dapat mengendalikan usaha;
10. Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara produktif.

Formulasi strategi memerlukan tindakan yakni menetapkan serangkaian langkah yang tepat agar tujuan perusahaan tercapai, yang meliputi pengembangan misi perusahaan, melakukan analisis SWOT (identifikasi peluang dan ancaman eksternal, dan melakukan pengukuran dan penetapan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang).

Dengan demikian indikator formulasi strategi terdiri dari (1). Merumuskan visi dan misi, 2. Melakukan analisis SWOT 3. Menetapkan tujuan (sasaran) jangka panjang 4. Menghasilkan strategi .5. Menyediakan alternatif dan memilih strategi (6). Menerima masukan dari stakeholders.

10. *Mengimplementasikan Strategi*

Implementasi strategi merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan strategik. Implementasi strategi bukan hanya sekedar merupakan hal yang bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik dalam penyusunan sebuah rencana strategis ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi semata, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari strategi. Oleh karena itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi strategi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses strategi. Sebaik apapun sebuah strategi tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat diterapkan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan/implementasi strategi adalah sesuatu yang penting, lebih penting dari membuat strategi itu sendiri. Strategi hanyalah merupakan mimpi atau rencana indah yang disimpan secara rapi dan tidak mempunyai arti jika tidak dilakukan implementasi atau diterapkan.

Oleh karena itu implementasi strategi perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (dalam Abdul Wahab, 2005). Agar strategi dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan keterlibatan tenaga kerja dan adanya kemampuan organisasi. Kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam sebuah rangkaian sebab akibat sehingga tindakan dapat terhubung dengan tujuan merupakan penerapan strategi.

Bukanlah masalah yang mudah untuk mengimplementasikan sebuah strategi terutama dalam mencapai tujuan bersama. Merupakan hal yang

cukup sulit dalam membuat sebuah strategi untuk kepentingan publik secara adil dan baik. Tetapi, pelaksanaan akan lebih sulit lagi karena tidak dapat memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap publik. Masalah lain yang timbul adalah sulitnya memenuhi tuntutan berbagai kelompok sehingga bisa mendorong berkembangnya konflik yang dapat dipolitisasi.

Pengimplementasian strategi kerap dianggap hanyalah sebagai pelaksanaan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh perumus perencanaan atau para pengambil keputusan, sehingga tahapan ini terkadang kurang berpengaruh. Namun dalam kenyataannya, tahap implementasi begitu penting dikarenakan oleh sebuah strategi jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tidak akan berarti apa-apa. Dengan kata lain, implementasi merupakan sebuah tahap dimana suatu strategi hendak secara maksimal dilaksanakan dan tujuan strategi itu sendiri dapat dicapai.

Dalam tahap formulasi strategi, tujuan dan sasaran direncanakan terlebih dahulu selanjutnya masuk ke tahap implementasi strategi. Dengan demikian, tahap implementasi strategi hanya terjadi setelah ditetapkan menjadi strategi melalui undang-undang atau peraturan daerah tentang suatu perencanaan strategis dikeluarkan dan dana yang disediakan untuk membiayai implementasi strategi tersebut telah tersedia. Karena itu, implementasi strategi merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi strategi sebagai tahap yang bersifat teoritis. Logika yang terkandung dalam implementasi strategi adalah *top-down*, yang memiliki

pengertian menurunkan atau menafsirkan berbagai alternatif yang masih bersifat abstrak menjadi lebih konkrit, atau mengubah alternative makro menjadi mikro.

Dalam proses strategi, implementasi strategi merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahapan ini, tujuan serta dampak strategi dapat dihasilkan sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi strategi merupakan penentu keberhasilan suatu proses strategi. Terdapat dua pendekatan dalam pelaksanaan implementasi strategi yaitu: “Pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* (Bryant, Coralie and White, Louise G. 2007) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach*.. Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (strategi) yang telah ditetapkan oleh pembuat strategi harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)”.

Pendekatan *bottom up* merupakan kebalikan dari pendekatan *top down*, dimana implementasi strategi terformulasi bersumber dari inisiasi warga masyarakat dan argumentasi yang diberikan adalah persoalan yang terjadi pada level daerah sehingga hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Dalam tahap implementasi strategi, pendekatan *bottom up* selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam proses penyusunan maupun pelaksanaannya.

Di dalam implementasi strategi, lembaga pemerintah diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan lembaga tahunan, memikirkan dan merumuskan strategi, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah di formulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan memiliki arti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi sebuah tindakan nyata. Implementasi strategi juga memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi yang harus diimbangi dengan imbalan yang memadai. Bagaimana menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan tantangan implementasi. Dengan demikian indikator implementasi strategi terdiri dari (1). program, (2). sasaran, (3). strategi, (4). prosedur, (5). metode, (6). budget, pelaksana (implementor).

11. *Perencanaan Strategik*

Yang menjadi acuan bagi perencanaan strategik adalah perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan. Menurut Fred R. David (2004), sebuah proses perencanaan strategis setidaknya memiliki tiga tahap, yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi. Osborne dan Gaebler, (1996) memberikan defenisi perencanaan strategis sebagai “suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi

untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar". Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penyusunan perencanaan strategis adalah agar organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi karena penyusunan perencanaan strategis memungkinkan organisasi dapat melihat secara obyektif, tajam dan realistis kondisi-kondisi eksternal dan internal.

Perencanaan strategik diarahkan pada sasaran untuk memperoleh keunggulan bersaing dan agar memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Dalam perencanaan strategik ditetapkan serangkaian keputusan dan kegiatan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan organisasi.

F. Rangkuti (1998) mengatakan bahwa : "Perencanaan strategik berguna pula sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya". Selanjutnya diterangkan pula bahwa cakupan perencanaan strategis setidaknya terdiri dari:

- 1) uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
- 2) uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi, dan
- 3) uraian tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

B. Kerangka Pemikiran

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakat merupakan subjek dan objek berbagai kegiatan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan yang ada sehingga memudahkan pemerintah dalam mengimplementasikannya sebagaimana dikatakan Ndraha dalam Siregar dan Siregar (2015). Ndraha menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai suatu keterlibatan mental emosional atau kelompok masyarakat agar yang bersangkutan terdorong atas kehendak sendiri secara swadaya mengambil bagian dalam mencapai tujuan bersama. Lebih jauh Cohen dan Uphoff (1997:7) menjelaskan bahwa dimensi partisipasi (siapa, apa, dan bagaimana). Menurut mereka, yang terlibat dalam perencanaan pembangunan (dimensi siapa) adalah masyarakat setempat, pemimpin lokal, aparatur pemerintah dan personel asing dari lembaga sukarela atau gereja. yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan (dimensi apa) terdiri atas partisipasi membuat keputusan; partisipasi dalam pelaksanaan; partisipasi menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

Kebijakan pemerintah secara nasional untuk membangun desa dari pinggiran telah secara nyata menguatkan posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi desa tersebut, program pembangunan desa harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota yang menjadi daerah induk desa. Program pembangunan desa yang dananya bersumber dari dana desa sebagaimana telah diatur dalam regulasi peraturan perundang – undangan melibatkan masyarakat desa secara

maksimal. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil hingga evaluasi, partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari kabupaten. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan desa harus merupakan perwujudan dari rencana strategik (visi dan misi) kabupaten. Sasaran umum pembangunan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (1985:59) ada tiga yaitu adanya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah; munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; serta tumbuhnya kemandirian suatu daerah. Cohen dan Uphoff (1987:28) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan mencakup keterlibatan dalam diskusi dan pertemuan, menyampaikan keluhan dan aktif berkontribusi dalam organisasi atau bisa saja menjadi oposisi. Selanjutnya Ndraha (1987:49) mengemukakan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berarti adanya keikutsertaan dalam mengarahkan daya dan dana, administrasi dan koordinasi serta penjabaran program yang akan dijalankan. Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan mengacu pada teori Cohen dan Uphoff (1980), dimana manfaat dimaksud terdiri dari tiga bagian, yaitu manfaat materil, berupa manfaat yang diterima secara pribadi seperti peningkatan konsumsi, pendapatan, atau aset; manfaat sosial berkaitan dengan barang public seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang lebih baik, ketersediaan air bersih; dan manfaat pribadi yang menyangkut kekuatan sosial atau politik. Selain teori tersebut, penulis juga mengacu pada teori Ndraha (1987:50) yang mengemukakan bahwa partisipasi menerima kembali hasil pembangunan memiliki arti masyarakat sebagai pemilik hasil pembangunan dan

mempergunakan hasil pembangunan tersebut, merawat dan mengusahakan, melakukan pemeliharaan rutin, mengatur penggunaannya dan mengembangkannya. Dalam hal penilaian (evaluasi), Ndraha (1987:51) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berupa penyampaian kritik, pendapat, tanggapan mengenai kebaikan atau keburukan sebuah kebijakan pemerintah. Berdasarkan teori tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah “bagaimana partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir”

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dipengaruhi oleh berbagai unsur sebagaimana dinyatakan oleh Sastropetro, Santoso, R.A (2008:41) yakni adanya komunikasi yang efektif; perubahan sikap dan tingkah laku; kesadaran berdasarkan perimbangan dan perhitungan yang baik; ethnousiasme yang menumbuhkan spontanitas; dan tanggung jawab atas kepentingan bersama. Unsur ini harus dimiliki oleh pejabat publik agar dapat menggerakkan tingkat partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan konteks perwujudan rencana strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, desa dan kabupaten merupakan satu kesatuan wilayah sehingga dalam menjalankan program pembangunan desa, harus mendukung visi dan misi kabupatennya. Glueck dan Jauch (2000:9) menyebutkan bahwa strategi adalah rencana yang terintegrasi, bersifat luas, dan disatukan untuk mencapai tujuan. F. Rangkuti (1998) mendefenisikan perencanaan strategik sebagai alat mencapai tujuan organisasi secara jangka panjang yang mencakup uraian visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, aktivitas, dan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai arah pembangunan desa saitnihuta dalam kaitannya mewujudkan visi dan misi kabupaten samosir.

Lebih jelasnya kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai partisipasi masyarakat Desa Saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir. Oleh karena itu, jenis penelitian yang dianggap relevan untuk meneliti persoalan diatas adalah jenis penelitian kualitatif. Satori dan Komariah (2009:23) menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengeksplor fenomena – fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian – pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar – gambar, gaya – gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Penelitian kualitatif harus mampu menghasilkan kejelasan, mampu diverifikasi, dan mengandung makna yang dapat dijadikan replikasi dari suatu perangkat data kualitatif ataupun kejadian – kejadian yang mendahuluinya, sebagaimana dikatakan oleh Miles dan Huberman (1992 dalam Sukardi, 2009:129). Lebih lanjut, Sugiyono (2001:6) mendefenisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”. Dengan model penelitian ini diharapkan dapat membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1983:63).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan situasi, kondisi dan fenomena realitas sosial mengenai partisipasi masyarakat Desa Saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir. Dalam penentuan subjek penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan kemungkinannya dalam memberikan informasi. Pemilihan informan pada tahap selanjutnya menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru dan berkualitas lagi.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek atau informan penelitian meliputi Kepala Desa Saitnihuta, Sekretaris Desa Saitnihuta, Tokoh Agama di Desa Saitnihuta, Tokoh Adat di Saitnihuta, Masyarakat pemilik lahan dan beberapa masyarakat lainnya yang ditentukan secara acak dan dapat memberikan informasi. Total responden seluruhnya sebanyak 8 (delapan) responden. Berdasarkan Profil Desa Saitnihuta, mayoritas penduduk desa adalah petani. Dari total 31 (tiga puluh satu) hektar areal persawahan, semuanya merupakan sawah tadah hujan. Sementara beberapa tahun terakhir, hujan tidak turun sebagaimana mestinya sehingga pertanian tidak dapat lagi diandalkan.

Berdasarkan visi dan misi kabupaten Samosir sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Terwujudnya

masyarakat samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian”, maka desa sait nihuta sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Samosir, diarahkan untuk pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata. Namun, mengingat bahwa kondisi pertanian di wilayah desa sait nihuta tidak memberikan hasil yang baik karena kondisi cuaca serta alih lahan pertanian menjadi permukiman menyebabkan penduduk kehilangan pekerjaan dan dalam jangka panjang dapat memicu kemiskinan, maka sebaiknya diarahkan untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, beberapa desa di Indonesia yang melakukan terobosan dengan mengembangkan pariwisata sudah menuai hasil yang baik dan bertransformasi dari desa miskin menjadi desa yang sejahtera. Posisi Desa Saitnihuta yang dekat dengan pusat kota dan memiliki pemandangan yang indah merupakan modal yang cukup potensial untuk mengembangkan sektor pariwisata, tentunya dengan dukungan partisipasi masyarakat.

C. Instrumen Penelitian

Guna memberikan gambaran yang jelas kepada semua pihak dan menemukan makna dibalik fakta yang ada serta menghasilkan data yang *valid* dan *ireliabel* maka sangat diperlukan pemilihan instrumen penelitian yang tepat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana partisipasi masyarakat Desa Saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer meliputi informasi langsung dari informan mengenai partisipasi masyarakat Desa Saitnihuta dalam mewujudkan perencanaan strategik (visi dan misi) Kabupaten Samosir. Data sekunder meliputi informasi yang berasal dari dokumen yang berkaitan langsung dengan program pembangunan Desa Saitnihuta.

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: menentukan subjek penelitian, memilih lokasi penelitian sebagai sumber data, mengurus perizinan dari birokrasi (Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir) guna kelancaran pencarian data, dan melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang diwawancarai yaitu:

1. Unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa
2. Unsur Masyarakat terdiri dari perwakilan Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Saitnihuta dan Masyarakat Desa Saitnihuta.

E. Analisa Data

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena pada tahap ini terjadi proses penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara agar lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan diklasifikasikan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang sudah diperoleh di lapangan disederhanakan dengan memilih bagian yang perlu dibuang, dan menggolongkan informasi yang sama

- untuk dapat disimpulkan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian;
2. Seluruh data yang dihasilkan merupakan informasi yang relevan dengan masalah dan disajikan dengan berbagai bentuk seperti narasi, tabel, dengan tujuan untuk memudahkan kesimpulan;
 3. Pengambilan kesimpulan atas data tersebut berdasarkan tujuan penelitian untuk menjawab masalah dalam penelitian;
 4. Untuk menguji keabsahan data atau informasi yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu:
 - a. Triangulasi metode, yaitu jika informasi atau data yang diperoleh berasal dari wawancara, maka peneliti menguji data atau informasi tersebut dengan hasil observasi dan dokumentasi.
 - b. Triangulasi sumber, yaitu jika informasi yang diperoleh berasal dari salah satu informan maka peneliti akan menguji informasi tersebut dengan informan lain.

Langkah yang dilakukan untuk kebutuhan analisa yaitu melakukan transkrip data hasil wawancara dengan nara sumber, menentukan kata kunci hasil wawancara untuk setiap pernyataan dari masing – masing nara sumber. Selanjutnya dilakukan penyimpulan sementara sebagai dasar untuk melakukan penggalian informasi yang lebih mendalam sehingga menghindari pengulangan kajian informasi dari nara sumber yang sama. Ketika data yang diperoleh sudah cukup sesuai kebutuhan penelitian, maka dilakukan perbandingan data dari satu sumber dengan sumber yang lain yang dikaitkan dengan kajian literatur untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang telah disusun oleh penulis sebagai berikut:

Acuan Pertanyaan Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?
2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?
3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?
4. Apakah desa satehuta sudah bisa mandiri?
5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?
6. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa
7. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan
8. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?
9. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa satehuta untuk mengembangkan wilayah desa satehuta sebagai desa wisata?
10. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?
11. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?
12. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?
13. Apakah ada upaya dari aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi?

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Desa Saitnihuta merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangururan, memiliki luas $2,5 \text{ km}^2$ berada pada ketinggian 50,37 meter diatas permukaan laut dan terletak pada koordinat $2^{\circ}45'$ lintang utara dan $98^{\circ}47'$ bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sianting – anting; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lumban Pinggol dan Desa Parsaoran 1; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Salaon Toba; sebelah barat berbatasan dengan Danau Toba. Berdasarkan data potensi desa tahun 2017, kondisi topografi desa saitnihuta terdiri dari dataran rendah seluas 1 km^2 dan wilayah berbukit – bukit seluas $1,5 \text{ km}^2$. Luas areal persawahan adalah $0,31 \text{ km}^2$ yang seluruhnya merupakan sawah tadah hujan. Tanah perkebunan seluas $0,55 \text{ km}^2$ merupakan kebun kopi yang tumbuh dengan subur, dan area ladang seluas $0,12 \text{ km}^2$, $0,893 \text{ km}^2$ merupakan area permukiman dengan total $0,803 \text{ km}^2$ luas areal pekarangan, sedangkan luas danau di wilayah administratif desa Saitnihuta adalah $0,015 \text{ km}^2$. Jumlah penduduk desa Saitnihuta pada tahun 2017 adalah 912 jiwa, terdiri dari laki – laki 429 orang dan perempuan 483 orang. Penduduk desa Saitnihuta merupakan masyarakat homogen. Hal ini dapat dilihat dari data etnis penduduk, dimana etnis batak simalungun terdiri dari 3 orang laki – laki dan 2 orang perempuan; suku jawa 1 orang perempuan; suku betawi 1 orang perempuan; suku nias 1 orang laki – laki dan 3 orang perempuan; batak karo 2 orang laki – laki dan 5 orang

perempuan; batak tapanuli 1 orang laki – laki dan 1 orang perempuan; serta batak toba 421 orang laki – laki dan 466 orang perempuan. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 15 orang laki – laki dan 22 orang perempuan; yang beragama Kristen sebanyak 246 laki – laki dan 289 orang perempuan; Katolik sebanyak 168 orang laki – laki dan 172 orang perempuan. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18 – 56 tahun) sebanyak 489 orang, terdiri dari 232 orang laki – laki dan 257 perempuan.

Desa Saitnihuta sudah cukup lama menjadi sebuah desa. Pada zaman penjajahan Belanda, Saitnihuta masuk pada kenegerian Pangururan yang dipimpin oleh Kepala Nagari. Saitnihuta dibagi dibagi 4 (empat) kampung yaitu (1) Kampung Sigalingging, (2) Kampung Saitnihuta Toruan, (3) Kampung Saitnihuta Atas, dan (4) Kampung Lumban Godang, Lumban Pancur, Siaekmual, Siotio, Lumban Sait, Sijaluk dan Sitanduk. Setiap kampung dipimpin oleh satu orang kepala kampung. Pada tahun 1957 terjadi penggabungan kampung yaitu Kampung Sigalingging, Saitnihuta Toruan dan Saitnihuta Atas menjadi kampung Saitnihuta. Sedangkan Kampung Lumban Godang, Lumban Pancur, Siaekmual, Siotio, Lumban Sait, Sijaluk dan Sitanduk berdiri sendiri dan dipimpin satu kepala kampung. Kemudian pada Tahun 1965, terjadi lagi penggabungan kampung Saitnihuta dan kampung Lumban Godang menjadi kampung Saitnihuta hingga saat ini disebut sebagai Desa Saitnihuta yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun 1 dan dusun 2. Dusun 1 terdiri dari 7 kampung (huta), yaitu Saitnihuta Atas, Saitnihuta Toruan, , Sigalingging Atas, Sigalingging Toruan, Partembokan, Lumban Godang, dan Pakkalah. Sedangkan Dusun 2 terdiri dari 6 kampung (huta),

yaitu Lumban pancur, Siaekmual, Sijaluk, Lumban Sait, Sitiotio dan Sitanduk.

Menurut Kepala Desa Saitnihuta, Desa Saitnihuta memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah lahan tidur yang luas dan cukup subur khususnya di dusun 2. Lahan ini sangat potensial dikembangkan menjadi areal pertanian khususnya tanaman pangan dan palawija, serta tanaman kopi yang sudah terbukti dapat tumbuh dan produktif. Selain untuk pertanian, lahan ini juga bisa dikembangkan untuk peternakan seperti peternakan sapi, kerbau dan kambing. Namun, lahan – lahan ini dibiarkan tidur oleh pemilik lahan karena alasan kepemilikan lahan. Lahan ini adalah milik marga/ klan yang secara turun temurun dikuasai oleh ahli warisnya. Saat ini pemilik lahan banyak yang berdomisili di kota lain dan tidak ada komunikasi dengan penduduk yang tinggal di Desa Saitnihuta, sehingga lahannya tidak difungsikan. Hasil wawancara dengan salah satu ahli waris pemilik lahan yang berdomisili di Desa Saitnihuta, dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengelola lahan karena faktor usia, selain itu, untuk mengelola lahan tersebut memerlukan ketersediaan air, sementara sumberdaya yang dimilikinya untuk menyediakan air tidak ada. Lahan pertaniannya akan ditanami jika curah hujan cukup tinggi sehingga mampu menyediakan air yang dibutuhkan. Penyediaan irigasi yang diperlukan dalam pertanian di desa tersebut tidak mampu dilakukan oleh warga meskipun secara gotong royong, karena mesin pompa air yang tersedia di pasaran kapasitasnya tidak mencukupi untuk jarak dan kondisi geografis desa. Apabila sektor pertanian ingin dikembangkan di desa Saitnihuta, dibutuhkan

ahli rekayasa teknologi pertanian dan orang – orang yang ahli dalam bidang pertanian untuk membimbing warga masyarakat dalam melaksanakan pertanian.



Gambar 4.1. Lahan tidur yang ada di dusun 2 Desa Saitnihuta



Gambar 4.2. Kebun Kopi yang tumbuh subur di Desa Saitnihuta

Pernyataan Kepala Desa mengenai potensi pertanian di Desa Saitnihuta pada kenyataannya memang benar adanya. Hasil wawancara

peneliti dengan masyarakat pemilik lahan perkebunan kopi yang tumbuh subur sebagaimana pada gambar 4.2. menyebutkan bahwa tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik dan subur di Desa Saitnihuta. Hanya saja butuh modal cukup besar untuk perawatannya seperti pemberian pupuk dan penyediaan air untuk menyiram lahan perkebunan kopi. Semakin baik perawatan yang dilakukan, maka produksi kopi juga semakin melimpah dan memberikan keuntungan kepada petani. Sumber air tidak terlalu jauh namun, untuk pompanisasi cukup sulit dilakukan dan membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan informasi dari warga masyarakat desa, untuk pengairan sawah dulunya ada pompa air besar yang dikelola oleh pemerintah melalui dinas pengairan ketika Samosir masih menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Pompa air ini berada di desa sianting – anting dan menyalurkan air ke dua desa, yakni desa sianting – anting dan desa saitnihuta. Namun setelah pemekaran menjadi Kabupaten Samosir, pompa ini tidak lagi berfungsi. Pemerintah Kabupaten Samosir membagikan pompa air kecil kepada kelompok tani untuk digunakan mengairi persawahan, hanya saja, satu – satunya sumber air berasal dari danau toba, sehingga kemampuan pompa air hanya dapat mengairi sawah yang posisinya dekat dengan danau toba, dengan kata lain penggunaan pompa air tersebut tidak dapat menjawab permasalahan kebutuhan air di Desa Saitnihuta. Menurut pengamatan peneliti, lahan – lahan pertanian yang subur dan produktif berada dekat dengan jalan sehingga dapat diakses kendaraan pengantar air bersih. Selain permasalahan air bersih, permasalahan masih

buruknya infrastruktur menjadi faktor kedua yang menjadi hambatan dalam pengembangan pertanian di wilayah ini. Sejauh ini, dana desa memang dipergunakan membangun infrastruktur desa, tetapi kemampuan keuangan dana yang tersedia sangatlah kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan. Karena itu, dilakukan pembangunan secara bertahap.

Kepala Desa menyebutkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk desa Saitnihuta adalah petani, namun pertanian yang dilakukan masih bersifat tradisional dan rata – rata petani di Desa Saitnihuta merupakan petani kecil – kecilan dengan modal usaha yang sangat kecil. Untuk meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian dibutuhkan pembaharuan di bidang pertanian mengingat lahan persawahan yang masih mengharapkan hujan untuk pengairannya. Selain itu, dibutuhkan juga modal usaha bagi para petani kecil agar bisa mengembangkan produksi pertaniannya. Selanjutnya menurut Kepala Desa, irigasi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan produksi pertanian. Hanya saja, hal tersebut membutuhkan dana yang sangat besar sehingga dana desa yang ada belum mampu untuk membiayai pengadaan irigasi tersebut.

B. Visi dan Misi Kabupaten Samosir dan Visi Misi Desa Saitnihuta

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2016 – 2021, Visi Kabupaten Samosir yaitu “Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian”. Dalam penjelasannya,

yang dimaksud dengan Samosir adalah seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Samosir. Sejahtera memiliki pengertian mutu sumber daya manusia yang tinggi dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial – budaya. Mandiri berarti mampu terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Berdaya saing diartikan sebagai memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing dan berkompetisi. Berbasis pariwisata dan pertanian dimaksudkan sektor pariwisata dan pertanian merupakan sektor unggulan utama dalam pembangunan ekonomi. Adapun misi pembangunan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berkompetisi dan profesional;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka membentuk manusia yang mandiri, berdisiplin, kreatif dan produktif serta berbudi luhur;
4. Pengembangan pariwisata lingkungan dan budaya serta pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama bisnis pariwisata;
5. Pengembangan sektor pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang mendukung industri pariwisata, kelancaran perekonomian dan memperlancar pelayanan publik;
7. Memantapkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum;
8. Memperluas jaringan kerjasama dalam pembangunan dengan prinsip saling menguntungkan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Visi dan Misi Desa Saitnihuta tercantum dalam Peraturan Desa Saitnihuta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019 berbunyi “Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih guna mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil, Makmur dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan juga misi desa Saitnihuta sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memaksimalkan sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, tertib, dan terbebas dari korupsi serta bentuk – bentuk penyelewengan lainnya;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan kepada UKM (Usaha Kecil Menengah), wiraswasta dan petani;
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan dan SDM untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih layak serta sadar akan hak dan

kewajibannya seagai warga desa sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

Penetapan sebuah visi pada dasarnya harus mengacu pada pengertian yang dijabarkan oleh para ahli sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Sebuah strategi (visi) merupakan perencanaan yang bersifat besar, luas dan terintegrasi serta berorientasi masa depan sehingga sangat berpengaruh bagi kemajuan organisasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal untuk meraih tujuan organisasi. Visi Desa Saitnihuta mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, merupakan strategi yang harus dilaksanakan oleh semua stakeholder.

Dari uraian visi dan misi diatas, dapat diketahui bahwa visi dan misi Desa Saitnihuta bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Samosir. Visi Desa Saitnihuta yakni terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam misi yang pertama, yaitu membangun sistem pemerintahan yang baik. Pada poin selanjutnya, Desa Saitnihuta memiliki misi memaksimalkan kinerja aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, pemerintahan yang bersih dan transparan serta terbuka dan bertanggung jawab, meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pendampingan dan meningkatkan mutu kesejahteraan sumber daya manusia merupakan langkah – langkah untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan memiliki daya saing tinggi.

Visi dan misi Desa Saitnihuta belum secara tegas menyebutkan capaian yang ingin diwujudkan, apakah sektor pertanian atau pariwisata. Tata kelola pemerintahan yang bersih, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, yang merupakan visi Desa Saitnihuta. Pemerintah Kabupaten Samosir telah menetapkan sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor yang akan dikembangkan. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Samosir, seharusnya Desa Saitnihuta menetapkan arah pembangunan ke salah satu dari sektor tersebut, agar terlihat adanya sinergitas antara visi dan misi desa dengan kabupaten. Menurut Kepala Desa, penetapan visi dan misi tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak mungkin berbicara tentang pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya apabila aparatur pemerintahannya belum tertata dengan baik. Penjelasan Kepala Desa tersebut, sudah sesuai dengan kaidah yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi, yaitu objektif, sederhana dan terfokus. Namun, memang, sangat diperlukan untuk menetapkan sektor strategis agar pembangunan yang dilakukan dapat terarah. Tentunya, sifat pembangunan sektor pertanian sangat berbeda dengan sektor pertanian. Untuk itu, diperlukan analisa mendalam mengenai sektor yang akan dimajukan di desa Saitnihuta.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa Saitnihuta menetapkan lima arah kebijakan pembangunan desa, yaitu:

- a. Kebijakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu:
 - (1) melengkapi struktur aparatur pemerintahan desa dan BPD;
 - (2)

- meningkatkan kapasitas aparaturnya pemerintah desa dan BPD; (3) peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa terutama pengadaan kantor kepala desa; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi desa; (5) peningkatan kapasitas keuangan desa.
- b. Kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan yang tertib, aman dan tenteram melalui: (1) Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas masyarakat desa; (2) penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM; (3) Peningkatan kesadaran politik masyarakat; (4) Peningkatan kualitas demokrasi di desa.
- c. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat: (1) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; (2) peningkatan potensi ekonomi desa; (3) peningkatan perkebunan khususnya perkebunan kopi, coklat, hortikultura, buah dan sayuran; (5) peningkatan peternakan khususnya peternakan besar; (6) peningkatan ekonomi kreatif di desa dalam rangka menciptakan sumber – sumber ekonomi baru.
- d. Kebijakan dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa serta jejaring dengan para pemangku kepentingan desa: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa; (2) pembinaan gotong royong di desa; (3) pembinaan kelompok sosial masyarakat; (4) peningkatan koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi; (5) peningkatan peran serta swasta dan perantau.
- e. Kebijakan dalam rangka meningkatkan infrastruktur desa; (1) peningkatan jalan desa; (2) peningkatan jalan usaha tani; (3) peningkatan jalan

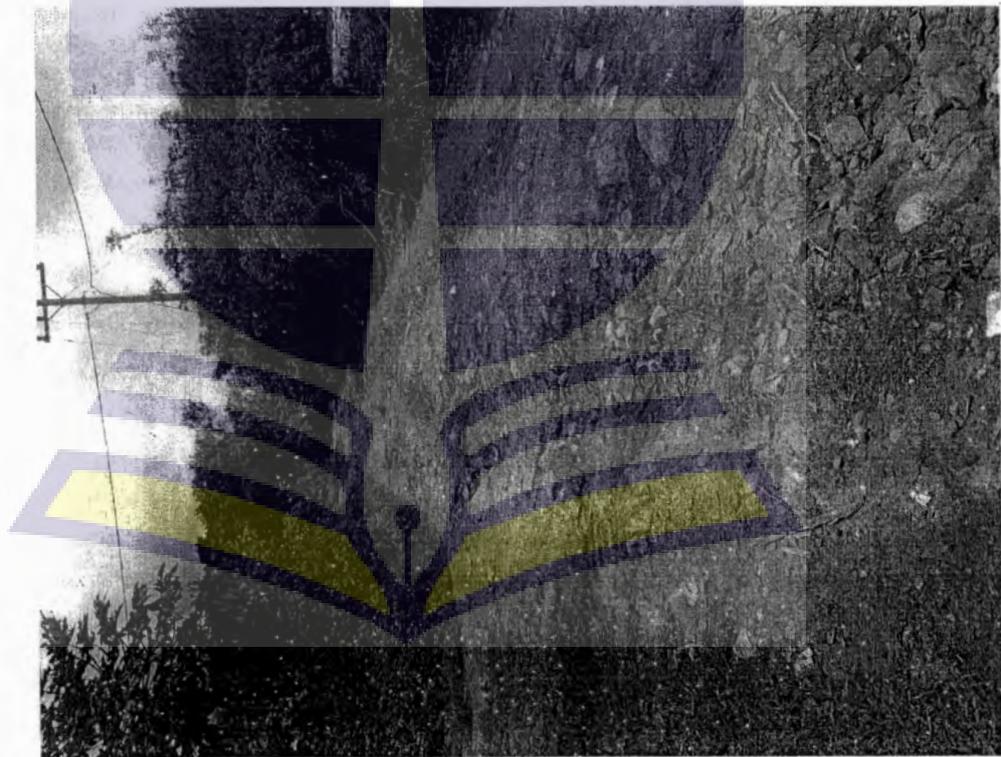
lingkungan antar kampung; (4) peningkatan jaringan irigasi desa; (5) peningkatan sarana sanitasi desa; (6) peningkatan sarana transportasi desa.

Berdasarkan uraian arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana telah disebutkan diatas, dari poin c dan selanjutnya diketahui bahwa pembangunan di Desa Saitnihuta diarahkan ke sektor pertanian dan peternakan. Meskipun, sebagaimana diuraikan dalam Bab I bahwa ada banyak desa yang dulunya miskin dan sekarang menjadi sejahtera berkat pengembangan sektor pariwisata, Kepala Desa mengatakan bahwa untuk saat ini, menurutnya, pengembangan sektor pariwisata di Desa Saitnihuta sangatlah sulit dilakukan. Memang, kondisi alam sudah sangat mendukung untuk pariwisata, akan tetapi, kondisi infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas publik lainnya belum dapat menunjang kemajuan di sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir memang sudah menunjukkan progress yang positif dan sudah ada beberapa desa yang ditetapkan sebagai desa wisata. Alangkah lebih baik jika pengembangan destinasi wisata yang sudah ada di Kabupaten Samosir itu terlebih dahulu dimaksimalkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Samosir.

Pengembangan sektor pariwisata ataupun sektor pertanian di wilayah ini memiliki tantangan tersendiri. Infrastruktur yang belum memadai menyebabkan akses ke wilayah ini tidak begitu lancar. Diperlukan kerja keras dan kreativitas semua *stake holder* untuk memajukan wilayah ini. Kepala desa, sebagai top leader di desa harus secara jeli melihat dan memanfaatkan peluang usaha yang dapat dikembangkan di desa. Kecakapan dalam

menganalisa strategi yang akan dilakukan diperlukan sehingga sumber daya berupa dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Diskusi – diskusi dengan masyarakat setempat, dengan lembaga – lembaga yang *concern* dalam pengembangan wilayah dan berbagai pihak perlu dilakukan untuk membahas pengembangan desa. Barangkali, langkah yang ditempuh oleh Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono, yang meminta agar Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mendatangkan mahasisiwanya melakukan KKN tematik di desanya.

Meskipun desa Saitnihuta sudah cukup lama keberadaannya, namun, kondisi sarana dan prasarana belum memadai sebagaimana terlihat di bawah ini:



Gambar 4.3. Kondisi jalan desa Saitnihuta sebelum ada dana desa

Dari gambar 4.3 tersebut diatas dapat dilihat kondisi jalan di desa saitnihuta. Sebelum adanya dana desa, kondisi jalan yang menghubungkan huta di saitnihuta kurang baik. Jalannya masih labil dan rawan longsor. Selain itu, sarana air bersih yang layak juga belum ada. Selama lebih dari 10 tahun setelah Kabupaten Samosir berdiri, pembangunan di Desa Saitnihuta masih sangat minim. Dana APBD Kabupaten Samosir memang relatif kecil, sehingga banyak wilayah perdesaan yang belum dapat dibenahi secara baik. Desa Saitnihuta memang tidak diunggulkan untuk pengembangan sektor pariwisata ataupun pertanian, sementara pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Pembangunan desa saitnihuta sendiri bukanlah prioritas pada saat itu.

D. Penggunaan Dana Desa

Sejak tahun 2015, seluruh desa di Indonesia menerima dana desa sebagai wujud nyata dari nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Desa Saitnihuta mengoptimalkan penggunaan dana desa tersebut untuk kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat dengan memperhatikan prioritas kebutuhannya. Pembangunan desa merupakan prioritas utama pemerintah saat ini. Selama ini, terdapat ketimpangan pendapatan antar daerah dan kesenjangan bahkan dalam satu wilayah sendiri. Pengalokasian APBN ke desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat mengambil bagian untuk mengawasi

penggunaan dana desa, agar dana desa tersebut dapat digunakan secara efisien untuk membiayai pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai payung hukum pengalokasian dana desa dari APBN, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan yang mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana desa dianggarkan secara nasional dalam APBN setiap tahun, penyalurannya melalui APBD Kabupaten yang selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dalam tiga tahapan, yaitu pada bulan april disalurkan sebesar 40%, tahap kedua pada bulan agustus sebanyak 40%, dan tahap ketiga pada bulan November sebanyak 20%. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan formula yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tersebut, diketahui bahwa penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pada prinsipnya, penggunaan dana desa adalah untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, agar penggunaannya lebih optimal dan tidak

lepas dari kontrol pemerintah atasannya, pemerintah pusat melalui menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan lembaga negara yang berkaitan. Mengacu pada prioritas yang dibuat, ditetapkanlah pedoman umum kegiatan. Selanjutnya, di tingkat daerah, bupati/ walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai dengan pedoman umum dari pemerintah pusat. Adapun prioritas dana desa antara lain untuk pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana desa dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan dana desa wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati/ walikota setiap semester yang dikordinir oleh camat masing - masing. Untuk semester pertama paling lambat minggu keempat juli tahun anggaran berjalan, dan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan januari tahun berikutnya. Selanjutnya, bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya, yang dilaporkan setiap

tahun. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, akuntabel, transparan, dan berkualitas, pemerintah memberikan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan, yakni berupa penundaan penyaluran dana desa. Selain sanksi penundaan, pemerintah atasan juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa bagi desa yang menggunakan danaya tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau jika terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

Untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, Pemerintah Desa Saitnihuta berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setiap tahun dilaksanakan musrembangdes yang diikuti oleh masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Saitnihuta, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan musrembangdes, undangan disebar kepada seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Saitnihuta, akan tetapi yang hadir kira – kira 25% dari seluruh undangan. Selama tiga tahun terakhir, masyarakat yang menjadi partisipan dalam musrembangdes persentasenya hampir sama setiap tahun. Di waktu lain, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa mengenai partisipasi mereka dalam musrembangdes. Ibu KG, warga masyarakat Desa Saitnihuta mengatakan bahwa dia selalu menghadiri undangan pemerintah desa, termasuk undangan pelaksanaan musrembangdes karena kegiatan tersebut merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan desa. Bapak PS mengatakan bahwa dia tidak mengerti dan tidak tertarik/ merasa tidak punya kapasitas untuk mengikuti rapat musrembangdes karena

menurutnya sudah ada orang yang lebih kompeten mengikuti acara tersebut, dan acara tersebut tidak memberikan manfaat finansial baginya sehingga yang bersangkutan memilih mengerjakan rutinitas pekerjaannya dan mengabaikan undangan. Hasil wawancara diatas menguatkan teori Cemea, Michael M (2007) yang menyebutkan prasyarat bagi partisipasi dalam organisasi, yaitu :

1. Kapabilitas masyarakat untuk secara psikologis terlibat dalam kegiatan partisipasi;
2. Seberapa baik masyarakat memandang kegiatan partisipatif;
3. Ketersediaan waktu;
4. Biaya partisipasi yang seharusnya tidak melebihi manfaat partisipasi.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti musrembangdes jika dikaji menurut teori Sastropetro, Santoso RA (2008) diakibatkan oleh:

1. Komunikasi tidak menumbuhkan pengertian yang efektif/ tidak berhasil;
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku tidak menumbuhkan kesadaran;
3. Tidak adanya kesadaran;
4. Tidak adanya ethnousiasme;
5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk kepentingan bersama.

Rencana penggunaan dana desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saitnihuta ditetapkan dalam Peraturan Desa Saitnihuta Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Pendapatan dan Belanja Desa Saitnihuta Tahun 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan	461.088.804,-
1	Pendapatan Asli Desa	0,-
2	Pendapatan Transfer	461.088.804,-
2.1	Dana Desa	267.409.804,-
2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota	8.304.000,-
2.3	Alokasi Dana Desa	185.375.000,-
	Belanja	465.787.470,-
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	117.720.000,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa	301.467.470,-
3	Bidang pemberdayaan masyarakat	27.600.000,-
4	Bidang peningkatan pendapatan desa	0,-
5	Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	19.000.000,-
	Pembiayaan	4.698.666,-

Sumber: Peraturan Desa Saitnihuta Nomor 2 Tahun 2015 tentang APBDes 2015

Dari Data APBDes 2015 diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan desa saitnihuta seluruhnya berasal dari pendapatan transfer, yang terdiri dari dana desa sebesar Rp 267.409.804,- kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 8.304.000,- dan dana alokasi dana desa diperoleh sebesar Rp 185.375.000,-. Pada sisi belanja, biaya penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk membayarkan penghasilan dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa sebesar total Rp 117.720.000,-. Selanjutnya, biaya pelaksanaan pembangunan desa

dianggarkan untuk membuat Rabat Beton dan saluran air di dusun 1 sebesar Rp 90.000.000,-; Pembangunan saluran drainase dusun 1 menuju dusun 2 dianggarkan sebesar Rp 141.909.804,-; dan pembangunan saluran air lingkungan lumban sait dusun 2 sebesar Rp 69.557.666,-. Defisit pendapatan terhadap belanja dibiayai dengan pembiayaan, yaitu silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 4.698.666,-

Tabel 4.2. Pendapatan dan Belanja Desa Saitnihuta Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan	875.796.000,-
1	Pendapatan Asli Desa	0,-
2	Pendapatan Transfer	875.796.000,-
2.1	Dana Desa	602.327.000,-
2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota	10.054.000,-
2.3	Alokasi Dana Desa	263.415.000,-
	Belanja	911.476.527,-
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	165.930.000,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa	660.546.527,-
3	Bidang pembinaan masyarakat desa	21.000.000,-
3	Bidang pemberdayaan masyarakat	64.000.000,-
4	Bidang peningkatan pendapatan desa	0,-
	Pembiayaan	35.680527,-

Sumber: Peraturan Desa Saitnihuta Nomor 4 Tahun 2016 tentang APBDes 2016

Dari tabel 4.2. diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pendapatan Desa Saitnihuta digunakan untuk bidang pembangunan desa. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2016 tidak ada penghasilan atau pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah. Pendapatan terbesar bersumber dari transfer dana desa yakni sebesar Rp 602.327.000,- . Pendapatan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan besaran dana desa tahun 2015. Untuk tahun 2016, belanja pembangunan desa yang dibiayai dari APBDes adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jalan lingkungan Korpri sebesar Rp 58.219.527,-
2. Pembukaan perkerasan jalan pakkalahan – lumban tubu sebesar Rp 200.000.000,-
3. Peningkatan jalan sigalingging – pakkalahan sebesar Rp 200.000.000,
4. Peningkatan jalan lumban pansur – sitiatio sebesar Rp 202.327.000,-

Total belanja untuk membiayai pembangunan desa pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 660.546.527,-.

Selanjutnya, untuk penggunaan dana desa tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Berikut ini akan diuraikan mengenai besar pendapatan dan jumlah belanja yang telah ditetapkan di desa saitnihuta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Pendapatan dan Belanja Desa Saitnihuta Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan	1.171.490.000,-
1	Pendapatan Asli Desa	0,-
2	Pendapatan Transfer	1.171.490.000,-
2.1	Dana Desa	764.764.000,-
2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota	11.299.000,-
2.3	Alokasi Dana Desa	395.427.000,-
	Belanja	1.235.447.694,-
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	319.500.000,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa	840.576.344,-
3	Bidang pembinaan masyarakat desa	5.000.000,-
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	50.600.000,-
5	Biaya tidak terduga	19.771.350,-
	Pembiayaan	63.957.694,-

Sumber: Peraturan Desa Saitnihuta Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDes 2017

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan sebesar Rp 1.171.490.000,- bersumber dari pendapatan transfer yang terdiri dari dana desa sebesar Rp 764.764.000,-, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 11.299.000,- serta alokasi dana desa sebesar Rp 395.427.000,-. Pada sisi belanja, untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pengeluaran berupa gaji dan tunjangan kepada desa dan perangkat desa, serta BPD sebesar Rp 191.550.000,- dan biaya operasional perkantoran sebesar Rp 73.200.000,- dan belanja pendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

lainnya sehingga total belanja untuk bidang ini sebesar Rp 319.500.000,-. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, dianggarkan belanja sebesar Rp 840.576.344,-. Adapun rincian rencana pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saluran/ Drainase jalan pakkalahan menuju lumban tubu Rp 300.000.000,-
2. Peningkatan jalan pakkalahan sebesar Rp 140.000.000,-
3. Peningkatan jalan lumban pancur menuju sitiatio sebesar Rp269.164.000,-
4. Pembangunan kantor kepala desa sebesar Rp 100.000.000,-
5. Pembangunan Aula/Rapat sebesar Rp 31.412.344,-

Selanjutnya dalam bidang pembinaan masyarakat desa, Pemerintah Desa Saitnihuta telah menganggarkan biaya pembentukan BUMDesa sebesar Rp 3.000.000,- dan biaya pelatihan sebesar Rp 2.000.000,-.

Berdasarkan observasi penulis, penggunaan dana desa di Desa Saitnihuta sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan, dimana dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai infrastruktur desa. Pada tahun 2015, persentase belanja untuk pelaksanaan pembangunan desa terhadap total pendapatan adalah sebesar 65,38%, dan di tahun 2016, persentasenya meningkat menjadi 75,42%. Sedangkan pada tahun 2017, persentase belanja pembangunan desa terhadap total pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2016, dimana tahun 2017, persentasenya adalah 71,75%. Akan tetapi, secara nominal, belanja pelaksanaan pembangunan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Artinya, dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa Saitnihuta memegang teguh prinsip dan amanat perundang – undangan. Pembinaan – pembinaan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa terus dilakukan. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah Desa Saitnihuta mulai menggalas pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan desa. Mengingat selama ini anggaran pembangunan hampir tidak menyentuh desa ini, dibutuhkan keseriusan dan kerja keras kepala desa untuk membenahi dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Desa Saitnihuta. Secara perlahan, penggunaan dana desa untuk pembangunan akan menunjukkan manfaatnya, dimana infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat desa akan semakin membaik. Sebagaimana telah dibahas diatas, walaupun tidak ditetapkan dalam visi dan misi desa mengenai arah pembangunan desa, apakah ke sektor pertanian ataukah sektor pariwisata, dari arah kebijakan desa diketahui bahwa Desa Saitnihuta lebih cenderung untuk meningkatkan sektor pertanian. Meskipun demikian, dari tiga tahun rincian penggunaan APBDDes, tidak ada dianggarkan untuk pengadaan irigasi. Padahal persoalan penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat dan juga untuk keperluan pertanian. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Saitnihuta mengatakan bahwa diperlukan dana yang sangat besar untuk penyediaan irigasi ke Desa Saitnihuta. Secara geografis, jarak desa ke danau toba, yang menjadi satu – satunya sumber air tidak terlalu jauh. Namun, mengingat letak danau yang lebih rendah daripada letak desa, dibutuhkan teknologi tertentu untuk mengalirkan air dari danau ke wilayah desa. Teknologi dan peralatan

yang diperlukan membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga besaran dana desa satu atau dua tahun tidak cukup untuk membiayainya. Oleh karena itu, penyediaan irigasi belum dapat diprioritaskan mengingat dana yang tidak tersedia untuk membiayai pengadaannya. Saat ini, Pemerintah Desa fokus untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan desa, pembuatan parit dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat desa. Kedepannya, Kepala Desa senantiasa mengupayakan tersedianya semua infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa demi kemajuan Desa Saitnihuta.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dengan memperhatikan data APBDes selama kurun waktu tiga tahun terakhir, dapat diketahui bahwa dengan adanya dana desa, membawa pengaruh positif terhadap percepatan pembangunan desa. Kepala Desa beserta jajarannya (perangkat desa) bersama – sama dengan masyarakat, sesuai amanat peraturan perundang – undangan membahas dan menentukan program kegiatan dan pembangunan yang diperlukan di Desa Saitnihuta. Perlahan – lahan, manfaat pengucuran dana yang dikelola langsung oleh desa sesuai dengan program nawacita yang digaungkan pemerintah pusat sudah mulai memperlihatkan hasil. Kondisi jalan di Desa Saitnihuta yang dulunya hanya perkerasan tanah yang labil, kini sebagian telah dibenahi menjadi jalan cor beton, sebagaimana terlihat dalam gambar ini:



Gambar 4.4. Kondisi sebahagian jalan saitnihuta per oktober 2018.

Penyaluran Dana Desa yang langsung dikelola oleh desa yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana pokok sesuai kebutuhan desa dinilai berhasil, mengingat dulunya jalan desa yang merupakan tanah perkerasan dan rawan longsor, kini terbuat dari beton yang dilengkapi drainase (saluran air) sehingga kemungkinan untuk longsor semakin tipis. Apabila Kepala Desa tetap konsisten dan memegang teguh amanat peraturan, niscaya beberapa tahun kemudian, tidak akan ada lagi jalan berlumpur di desa ini. Selanjutnya, dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha dengan memaksimalkan kinerja BUMDes. Meskipun tingkat kehadiran masyarakat desa saitnihuta dalam pelaksanaan musrenbangdes sangat minim, ternyata perwakilan masyarakat bersama dengan pemerintah desa dapat merumuskan program pembangunan demi kemajuan desa dan kepentingan bersama. Dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Saitnihuta, Kepala Desa Saitnihuta memegang komitmen atas visi dan misi desa yang

menjanjikan keterbukaan dan transparansi. Hal ini terlihat dari fakta di lapangan, dimana Pemerintah Desa selalu membuat pertemuan untuk memaparkan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan termasuk harga bahan dan upah kerja. Setelah pekerjaan selesai, realisasi pembayaran yang dilakukan pun, dilaporkan dalam rapat dengan masyarakat desa. Kepala Desa memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada semua warganya, untuk membicarakan hal – hal yang mungkin ada di benak masyarakat terkait penggunaan dana desa. Dalam pelayanan administrasi, Kepala Desa beserta jajarannya sangat peduli dan melayani dengan rasa kekeluargaan dan penuh keramahan. Barangkali, hal inilah yang meningkatkan kepercayaan masyarakat desa kepada kepala desa. Di usianya yang sudah matang dan sudah berkali – kali mengalami pergantian kepala desa, Desa Saitnihuta belum memiliki kantor desa. Dibawah kepemimpinan W. Rogandatua, yang terpilih menjadi kepala desa sejak tahun 2013, salah seorang warga pemilik lahan menghibahkan tanahnya untuk dijadikan kantor desa. Pada tahun 2017, kantor desa pun berdiri dengan kokoh walaupun masih sangat sederhana, sebagaimana gambar berikut:





Gambar 4.5. Kantor Desa yang dibangun pada tahun 2017

Kondisi alam desa saitnihuta yang indah juga menyimpan potensi wisata yang besar. Pemandangan yang ditawarkan juga tak kalah menarik dengan daerah lain yang ada di pulau samosir. Lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Pangururan namun kondisinya masih alami membuat nilai jual pariwisatanya semakin tinggi. Apabila dibenahi dengan serius, desa saitnihuta dapat menjadi desa wisata seperti desa – desa yang telah berbenah di Jawa. Sistem pertanian dengan cara tradisional tidak memberikan hasil yang baik kepada petani. Dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada, desa saitnihuta diyakini mampu bersaing dengan objek wisata yang tengah berkembang di Samosir. Sebaliknya, apabila hanya mengandalkan pertanian dengan cara tradisional maka perkembangan ekonomi di Desa Saitnihuta

tidak akan mengalami peningkatan. Dengan semakin lancarnya akses ke Samosir, minat wisatawan untuk berkunjung akan semakin meningkat. Daerah atau desa yang menjadi tujuan wisata di pulau Samosir akan mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan masyarakatnya sejahtera. Karena itu sudah seharusnya desa Saitnihuta ikut berbenah dan menggeluti sektor pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, kepala desa mengatakan bahwa saat ini, pihaknya fokus untuk perbaikan sarana dan prasarana pokok yang dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa tidak akan mungkin suatu daerah bisa memajukan pariwisata bila sarana dan prasarana tidak tersedia. Untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Diharapkan BUMDesa ini memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan ekonomi desa Saitnihuta.

Hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMDesa, saat ini pihaknya sedang merintis wisata air. Direncanakan di pantai Saitnihuta dibangun wahana permainan air dan juga *tour boat*, dimana wisatawan akan diajak berkeliling menggunakan perahu berlayar di bawah jembatan tano ponggol yang beberapa tahun lagi akan menjadi jembatan termegah di Samosir dan menyusuri pinggiran danau menuju aek rangat. Hanya saja, wacana ini terkendala masalah kepemilikan lahan tepi danau. Sampai saat ini belum ada implementasi peraturan mengenai kepemilikan tanah 50 meter dari garis pantai.

Terkait pengelolaan lahan tidur yang ada di Desa Saitnihuta, Kepala Desa menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan milik klan tertentu dan sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara keturunannya mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kebanyakan pemilik lahan tersebut saat ini sudah berada di luar Kabupaten Samosir sehingga sulit untuk menyelesaikan permasalahannya.

E.1. Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam Perencanaan

Berdasarkan hasil observasi peneliti, partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrembangdes merupakan partisipasi semu, artinya bahwa walau hadir tetapi tidak berkontribusi terhadap perencanaan penggunaan dana desa. Hal ini terjadi karena ketidakmengertian masyarakat desa mengenai perencanaan. Selain itu, tidak adanya kontribusi masyarakat disebabkan oleh karena masyarakat merasa tidak ada gunanya karena tidak akan ditanggapi. Kemudian, program kegiatan yang diturunkan dari pemerintah atasan membuat masyarakat merasa tidak diberi kesempatan. Kondisi ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Cemea, Michael M (2007), dimana disebutkan bahwa ada berbagai prasyarat bagi partisipasi organisasi, yaitu : (1) Kapabilitas masyarakat untuk secara psikologis terlibat dalam kegiatan yang dipilih untuk berpartisipasi; (2) seberapa baik masyarakat memandang kegiatan -- kegiatan partisipatif; (3) ketersediaan waktu bagi partisipasi yang berarti; (4) biaya partisipasi seharusnya tidak melebihi manfaat dari partisipasi tersebut. Jika prasyarat diatas tidak dipenuhi menyebabkan pendekatan

partisipatif gagal memberikan hasil yang diharapkan bahkan bisa menghasilkan sikap negative di pihak peserta.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam perencanaan masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir dalam musrembang desa hanya 25% dari total keluarga yang ada di desa saitnihuta. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan perlu disikapi oleh pemerintah desa. Perlu dilakukan pendekatan – pendekatan agar ke depannya partisipasi masyarakat semakin meningkat. Sebagaimana dikatakan oleh Siagian (2004), bahwa pembangunan untuk masyarakat akan terwujud dengan cara atau melalui dan bersama rakyat sendiri. Partisipasi dalam perencanaan menurut Cohen dan Uphoff (1987) mencakup keterlibatan dalam pertemuan, diskusi, voting mungkin juga lobbying, menyatakan keluhan – keluhan, ikut berkontribusi dalam organisasi bahkan kegiatan demonstrasi dan oposisi.

E.2. Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dibiayai dana desa, **sebagian masyarakat ikut serta dan berpartisipasi secara aktif** untuk turut serta dalam kegiatan. Pembangunan yang didanai oleh dana desa dikerjakan oleh beberapa orang penduduk desa saitnihuta yang dominan laki – laki. Hal ini memperlihatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa saitnihuta. Akan tetapi, hasil wawancara kami, sebagian penduduk mengatakan bahwa keikutsertaanya

dalam pelaksanaan pembangunan karena adanya upah yang dibayarkan, sebagian kecil menyatakan keterlibatan mereka adalah dalam rangka mengawal dan memastikan percepatan pembangunan desa saitnihuta.

Sebagaimana menurut Ndraha (1987), partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi (a) ikut serta dalam mengarahkan daya dan dana, (b) ikut serta dalam administrasi dan koordinasi, (c) dan ikut serta dalam penjabaran dalam program. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam pelaksanaan pembangunan juga masih rendah. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi ditingkat pelaksanaan pembangunan, apakah program kegiatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan minat masyarakat agar dapat terlibat lebih aktif, atau dilakukan sosialisasi atau penyuluhan akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam kajian teoritis dalam bab sebelumnya, dikatakan bahwa unsur utama dari partisipasi adalah kesadaran anggota masyarakat berdasarkan keterikatan mental anggota kelompok dalam memberikan sebagian tenaga, pikiran, dan materi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, masyarakat memberikan tenaga, pikiran, materi dan waktunya apabila ada manfaat langsung yang diterima (Ndraha, 1985).

E.3. Partisipasi Masyarakat Desa Saitnihuta Menerima Hasil Pembangunan

Adanya pembangunan infrastruktur di Desa Saitnihuta disambut baik oleh masyarakat desa. Akses jalan menjadi lancar dan kendaraan

dapat melaju dengan lancar. Hasil pembangunan infrastruktur di Desa Saitnihuta belum secara nyata mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan diri. Belum terlihat tanda – tanda atau upaya untuk mencoba perubahan pekerjaan dari pertanian ke sektor lain, seperti pariwisata dan UKM. Dengan kata lain, tingkat partisipasi untuk menerima hasil pembangunan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh karena pembangunan desa saitnihuta masih tahap awal dan masih sederhana, sehingga efek *multiflier* pembangunan belum memperlihatkan hasil.

Sedangkan secara teoritis, Ndraha (1987) mengemukakan bahwa wujud partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan adalah keterlibatan dalam menerima setiap hasil pembangunan sebagai pemilik sendiri, menggunakan setiap hasil pembangunan, mengusahakan dan merawat, memelihara secara rutin, mengatur penggunaannya, dan mengembangkannya. Tingkat partisipasi untuk menerima kembali hasil pembangunan cukup tinggi, kecuali pada poin memelihara secara rutin. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran akan terbatasnya sumber dana.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, baik dari dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan hasil pembangunan pemerintah desa saitnihuta perlu melakukan upaya – upaya berupa komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk dapat secara spontan dan bersedia berpartisipasi secara sukarela tanpa

paksaan karena adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Adapun langkah yang perlu ditempuh antara lain:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sipil. Selain untuk infrastruktur, dana desa sebagian dianggarkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai peran penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Menggunakan orang – orang berpengaruh di desa (pemuka agama, penatua desa) untuk kampanye kesadaran publik.
3. Komunikasi langsung perangkat desa dan kepala desa dengan masyarakat desa ;
4. Memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan yang bersumber dari dana desa;
5. Memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan yang dibutuhkan;
6. Membuka kesempatan seluas – luasnya bagi sukarelawan atau lembaga non profit untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan masyarakat desa;
7. Mendorong partisipasi perantau dan masyarakat lokal untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembukaan usaha desa atau pembinaan kelompok usaha bersama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

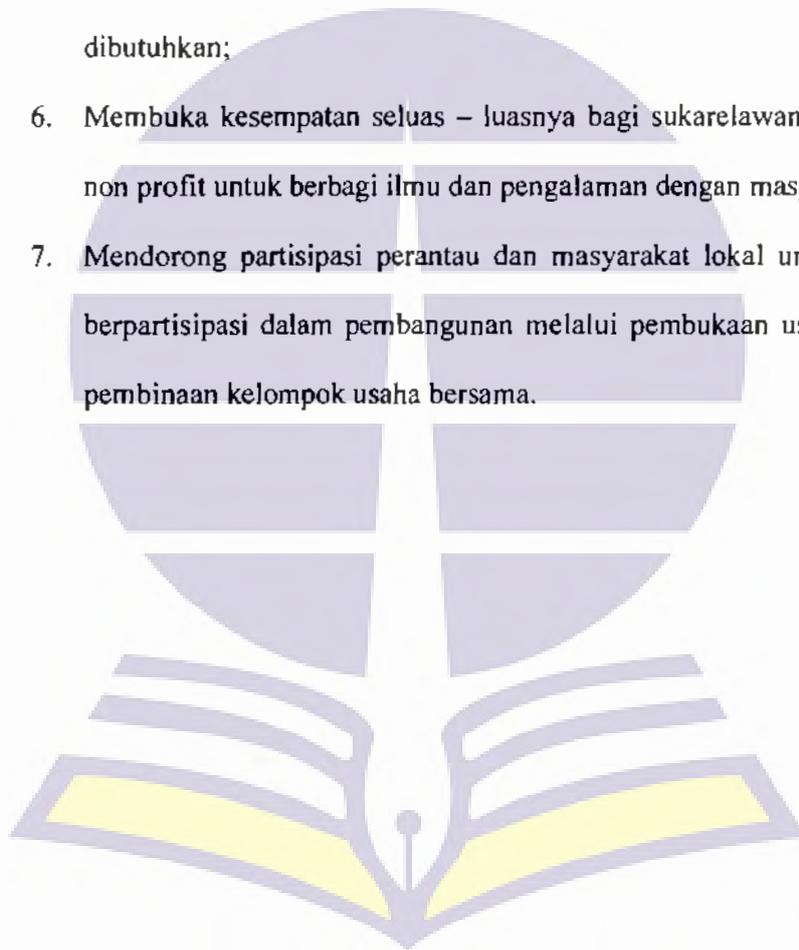
1. Partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam perencanaan pembangunan (musrebangdes) masih rendah.
2. Partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah.
3. Partisipasi masyarakat desa saitnihuta dalam menerima hasil pembangunan cukup tinggi, kecuali pada poin memelihara secara rutin.
4. Arah penggunaan dana desa yang dilakukan adalah untuk membangun infrastruktur berupa jalan desa dan dyk.
5. Penggunaan dana desa yang dilakukan mendukung perwujudan perencanaan strategik (visi dan misi) kabupaten Samosir.

B. Saran

Hal – hal yang perlu dilakukan pemerintah desa saitnihuta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sipil. Selain untuk infrastruktur, dana desa sebagian dianggarkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai peran penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

2. Menggunakan orang – orang berpengaruh di desa (pemuka agama, penatua desa) untuk kampanye kesadaran publik.
3. Komunikasi langsung perangkat desa dan kepala desa dengan masyarakat desa ;
4. Memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan yang bersumber dari dana desa;
5. Memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan yang dibutuhkan;
6. Membuka kesempatan seluas – luasnya bagi sukarelawan atau lembaga non profit untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan masyarakat desa;
7. Mendorong partisipasi perantau dan masyarakat lokal untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembukaan usaha desa atau pembinaan kelompok usaha bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo: Pondok Edukasi
- Adul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adi, I.R. *Interview Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- BPS, Samosir *Dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, 2016.,
- Bryant, Coralie and White, G, Louise, 2007. *Manajemen Pembangunan Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Bunator, 1999. *Pembangunan Pedesaan dari Bawah dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta : Media Baru.
- Cohen and Uphoff, 1997. *Rural Development Participation*. Cornell University, New York.
- David, F.R, 2006. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Salemba Empat.
- David Osborne dan Ted Gaebler, 1996. *Mewirausahakan Birokrasi*, Terjemahan Abdul Rasyid. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- F. Rangkuti, 1998. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin, 2004. *Komitmen Organisasi*, Terjemahan. Jakarta : Erlangga.
- Hadari Nawawi 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hetifah Sj. Sumarto, 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Holdar, Gina Gilbreath and Zakharchenko, Olha, 2002. *Citizen Participation Handbook. People'e Voice Project International Centre for Policy Studies*. iMedia Ltd.

- Jauch, Lawrence R. Dan William F. Glueck, 2000. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta : Erlangga.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode – metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ndraha, Taliziduhu, 1985. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugraha, Muhammad Quadrat, 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Parsons, Wayne, 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media.
- Pearce II, John A. Dan Robinson Richard B. Jr . 2008. *Manajemen Strategis 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- P. Robbins, Stephen. 2008. *Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi ke Sepuluh)*, Ali Bahasa Drs. Benyamin Molan, Jakarta : Salemba Empat.
- Sastropetro, Santoso, RA, 2008. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni 1986.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Sukanto, Soerjono, 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, Tjahya, 2005. *Stimulasi Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa*, Jakarta : Diklat IIP.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 2000. *Good Government (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)* Jakarta : Universitas Indonesia.
- Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jurnal

Etwiory, Coce Lily, SH, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara*, Universitas Terbuka, 2013.

Griadhi, Ari Yuliantini dan Utari, Anak Agung Sri *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Kertha Patrika, Volume 33 Nomor 1, 2008.

Irianto B. Liestyodono, Enceng, dan Broto, Mani Festati *Model Perumusan Kebijakan Publik Partisipatif (Studi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 di Kabupaten Tasikmalaya)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka, 2013

Jamaluddin, Yanhar, dkk 2018. *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah* JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6 (1) (2018): 14-24

Nuryanti dan Istiyanto, S. Bekti, *Studi Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Pabuwaran, Purwokerto Utara, Banyumas* dalam Acta diumna Vol. 10 No. 1, 2014

Siregar, Akbar Putra dan Siregar, Robert Tua. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Regional Planning Volume 4 Nomor 2, Agustus 2015.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua>

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3217850/sector-pariwisata-jadi-investasi-unggulan-di-2018>

Acuan Pertanyaan Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?
2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?
3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?
4. Apakah desa sitnihuta sudah bisa mandiri?
5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?
6. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa
7. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan
8. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?
9. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa sitnihuta untuk mengembangkan wilayah desa sitnihuta sebagai desa wisata?
10. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?
11. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?
12. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?
13. Apakah ada upaya dari aparat desa untuk meningkatkan partisipasi?

Informan 1

Tanggal Wawancara : 5 Oktober 2018

Tempat/ Waktu : Kantor Kepala Desa Saitnihuta

Identitas Informan 1

1. Nama : Bapak W. Rogandatua
2. Pekerjaan : Kepala Desa Saitnihuta
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Dalam pelaksanaan musrembang atau rapat desa lainnya, kami selalu menyampaikan undangan kepada semua warga desa, satu per kepala keluarga. Hanya saja, yang mau menghadiri hanya sekitar lebih kurang 30% dari total undangan yang disebar.

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Selama ini, sebelum ada dana desa, pembangunan 100% bergantung pada kebijakan kabupaten. Desa Saitnihuta jarang sekali mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Pembagian pompa air dan bibit jagung pernah dilakukan oleh dinas pertanian, hanya saja pompa tersebut tidak bisa difungsikan mengingat sumber air yang jauh dan kondisi geografis desa tidak memungkinkan penggunaan pompa air biasa. Semestinya pompa yang digunakan adalah pompa besar yang mampu menghantar air dari danau ke lokasi persawahan, namun memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sejak ada dana desa (2015), pembangunan sudah mulai dilakukan tetapi

diutamakan perbaikan infrastruktur berupa jalan, saluran air dan dyk. Peningkatan taraf hidup masyarakat belum signifikan bertambah.

3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

Sampai saat ini tidak ada peningkatan partisipasi. Sebagian kecil masyarakat desa terlibat dalam proses pembanguna karena ada upah kerja. Selebihnya tidak terlalu peduli dengan program desa.

4. Apakah desa sarnihuta sudah bisa mandiri?

Jawab:

Belum. Untuk mandiri butuh waktu yang masih lama. Saat ini masih banyak pembenahan yang harus dilakukan. Sejauh ini kita memang sudah membentuk pengurus BUMDes, akan tetapi usaha yang akan dijalankan masih bersifat wacana.

5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Jawab:

Hanya sebagian kecil saja yang mau menyampaikannya. Yakni beberapa dari mereka yang selalu ikut menghadiri rapat desa.

6. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa

Jawab:

Yang paling cocok saat ini adalah peternakan kambing, kerbau atau sapi. Karena banyak padang rumput yang bisa menjadi sumber makanan ternak. Untuk pertanian, yang cocok ditanami adalah tanaman palawija karena tidak membutuhkan terlalu banyak air. Saat ini kami telah membentuk BUMDes, dan program kerja mereka adalah pengembangan wisata.

7. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Pada dasarnya masyarakat siap menerima program pembangunan

8. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Lahan tersebut adalah milik klan tertentu dan diwarisi oleh ahli warisnya. Pemerintah desa tidak berhak untuk mengalihfungsikan lahan tersebut.

9. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa sarnihuta untuk mengembangkan wilayah desa sarnihuta sebagai desa wisata?

Jawab:

Saat ini prioritas penggunaan dana desa adalah pembenahan infrastruktur seperti pengadaan jalan, pembuatan dyk agar akses keluar masuk desa semakin lancar. Setelah itu semua terbenahi, mungkin akan diarahkan ke pembangunan desa wisata.

10. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Yang pertama, tentunya ketersediaan air bersih. Kedua, infrastruktur yang masih minim. Ketiga, petani desa ini adalah petani kecil – kecilan yang modal usahanya sangat kecil. Sehingga untuk mengembangkan pertanian dibutuhkan pengairan yang cukup atau pengadaan irigasi, namun dananya sangatlah besar, desa tidak bisa mendanainya. Modal usaha juga diperlukan oleh para petani untuk mengembangkan produksi.

11. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

Sejauh ini kita mengirimkan surat undangan kepada masyarakat melalui kepala dusun masing – masing.

12. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?

Jawab:

Sejauh ini kita berusaha komunikatif. Setiap ada kegiatan kita selalu menyebarkan undangan kepada masyarakat desa dan undangannya diantar satu per KK. Undangan tersebut disebar oleh kepala dusun masing – masing. Kita juga selalu berada di kantor desa dari pagi sampai sore untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat desa, agar masyarakat tidak kecewa ketika mereka punya kepentingan ke kantor desa.

13. Apakah ada upaya dari aparat desa untuk meningkatkan partisipasi?

Jawab :

Ya, kita melaksanakan proses penyusunan APBDes sesuai ketentuan perundang – undangan. Kita menyampaikan undangan ke setiap kepala keluarga, ada 221 kk, namun, yang datang paling banyak 30% saja.

14. Terkait Visi an Misi Desa, apakah bersinergi dengan visi misi kabupaten?

Jawab:

Semestinya bersinergi, karena kita mengacu pada peraturan pemerintah atasan. Walaupun kita menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita.

15. Dalam pelaksanaan program desa, apakah masyarakat terlibat secara aktif?

Jawab:

Sebagian masyarakat memang terlibat secara aktif, tapi hanya sebagian kecil.

16. Apakah dalam proses pelaksanaan pekerjaan, ada upah atau semacamnya diberikan kepada masyarakat?

Jawab:

Ya, dalam sebuah pekerjaan, dalam RAB nya sudah ditentukan berapa orang yang mengerjakan dan berapa upah yang akan dibayarkan. Hal ini yang membatasi sehingga tidak semua penduduk bisa terlibat semua, terbatas kepada pembayaran upah.

17. Bagaimana tanggapan masyarakat atas pembangunan yang dilakukan?

Jawab:

Pada dasarnya, sangat senang karena infrastruktur mulai dibenahi. Tapi, kesadaran untuk memelihara masih kurang. Misalnya, Parit yang dekat dengan rumah atau sawahnya masih sering ditemukan sampah yang memang mungkin terbawa air hujan, belum ada kesadaran untuk segera membersihkan agar aliran air lancar dan tidak merusak jalan.

18. Rata – rata penduduk desa adalah petani ya Pak, sementara kondisi sumber air yang jauh dan masih mengandalkan hujan. Apa tidak direncanakan pipanisasi atau langkah lainnya Pak?

Jawab :

Untuk membuat pipanisasi itu memerlukan biaya yang amat besar. Kami sudah coba konsultasikan dengan beberapa orang yang saya kenal yang mengerti tentang ini, biayanya bisa memakai dana desa selama 5 tahun, sementara peruntukan APBDes juga untuk membiayai belanja pegawai dan barang jasa lainnya, dan juga, infrastruktur desa juga masih sangat minim. Sebenarnya karena banyaknya lahan padang rumput yang luas sangat cocok untuk mengusahakan peternakan kerbau atau sapi atau kambing. Kalau untuk tanaman, tanaman pangan, tanaman palawija, kopi, dan tanaman keras lainnya yang tidak terlalu membutuhkan banyak air.

19. Sesuai dengan visi Kabupaten Samosir, “Terwujudnya masyarakat samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian”, dan melihat perkembangan di berita bahwa setelah ada beberapa desa yang dulunya miskin jadi sejahtera karena sektor pariwisata, apakah Bapak akan mengarahkan potensi ekonomi masyarakat ke sektor pariwisata?

Jawab:

Masih sulit menuju ke sana (pariwisata) karena kondisi infrastruktur yang sangat kurang. Saya juga telah membaca dan mendengar ada desa di Jawa dan Bali yang berhasil meningkatkan pendapatan dengan menggunakan dana desa untuk membangun fasilitas wisata. Kita tahu bersama bahwa infrastruktur di Jawa sudah sangat baik, sehingga tantangan yang dihadapi hanyalah untuk pengembangan. Sementara di Samosir, hanya sebagian kecil wilayah saja yang sudah mulus akses infrastrukturnya.

20. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

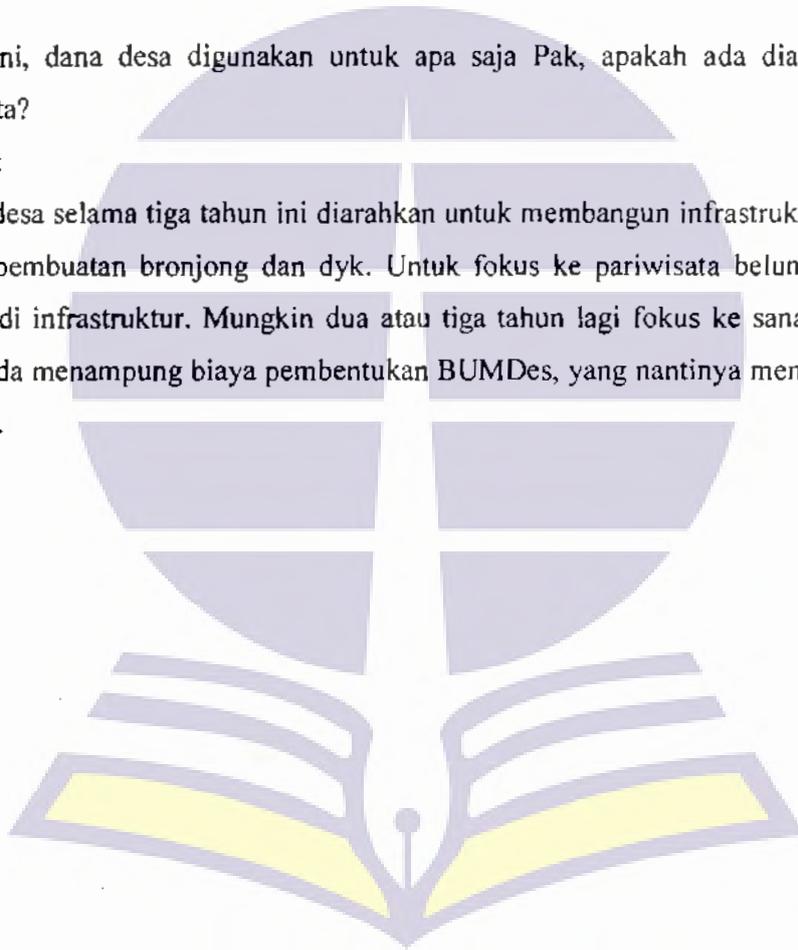
Jawab:

Lahan – lahan tersebut merupakan milik marga/ klan tertentu yang secara turun temurun dikuasai oleh ahli warisnya. Saat ini banyak ahli waris yang berdomisili di kota lain dan tiak ada komunikasi dengan penduduk yang tinggal, sehingga lahannya tidak difungsikan. Sebagai kepala desa, saya tidak bisa sembarangan untuk melakukan sesuatu karena lahan tersebut bukan milik desa tetapi milik masyarakat.

21. Sejauh ini, dana desa digunakan untuk apa saja Pak, apakah ada diarahkan menuju pariwisata?

Jawab:

Dana desa selama tiga tahun ini diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa, pembuatan bronjong dan dyk. Untuk fokus ke pariwisata belum karena masih fokus di infrastruktur. Mungkin dua atau tiga tahun lagi fokus ke sana. Saat ini dana desa ada menampung biaya pembentukan BUMDes, yang nantinya mengarah ke sektor wisata.



Informan 2

Tanggal Wawancara : 5 Oktober 2018
Tempat/ Waktu : Kantor Kepala Desa Saitnihuta

Identitas Informan 2

1. Nama : Ibu Artauli Sitanggung
2. Pekerjaan : Sekretaris Desa Saitnihuta
3. Jenis Kelamin : Perempuan

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Setiap ada rapat desa, baik tentang anggaran atau hal lainnya undangan dibagikan ke seluruh kepala keluarga. Per keluarga dapat satu undangan.

2. Apakah masyarakat antusias memenuhi undangan tersebut?

Jawab:

Selama ini, yang hadir paling banyak antara 25 – 30% saja. Kalau ditanya yang tidak hadir jawabannya karena urusan pekerjaan atau adat.

3. Langkah – langkah apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa?

Jawab:

Sejauh ini, undangan langsung dibagikan oleh kepala dusun masing – masing, dan diupayakan untuk bertemu langsung dengan kepala keluarga yang bersangkutan. Diingatkan juga melalui telepon (HP). Akan tetapi, yang hadir itu – itu saja.

4. Apakah masyarakat ada yang menyampaikan keluhan terkait pengelolaan dana desa atau proses pembangunan desa oleh masyarakat yang tidak pernah datang?

Jawab:

Sejauh ini tidak ada keluhan dari mereka, tidak ada juga saran ataupun masukan.

5. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Hal ini belum dapat kita lihat, karena memang efek pembangunan bisa dilihat setelah beberapa tahun kemudian.

6. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

Masih sama seperti yang dulu.

7. Apakah desa saat ini sudah bisa mandiri?

Jawab:

Sampai saat ini belum. Desa masih sangat tergantung pada dana desa.

8. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Jawab:

Sebagian kecil masyarakat menyampaikan kritik, saran dan masukan terkait perkembangan desa saat ini.

9. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa

Jawab:

Sesuai dengan profil desa dan dokumen APBDes, potensi desa dikembangkan untuk menjalankan peternakan dan pertanian tanaman keras seperti palawija.

10. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Pada dasarnya masyarakat desa siap

11. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Areal persawahan tersebut milik klan tertentu dan ahli warisnya adalah keturunan marga/ klan tersebut. Pemerintah desa tidak punya wewenang untuk mengalihfungsikan.

12. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa saitnihuta untuk mengembangkan wilayah desa saitnihuta sebagai desa wisata?

Jawab:

Sejauh dalam anggaran ditetapkan begitu, kami terima saja.

13. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Kondisi alam, ketersediaan air, dan minimnya infrastruktur menjadi kendala utama.

14. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

Sejauh ini, kita tetap berusaha komunikatif. Kita selalu menyurati warga terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.

15. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?

Jawab:

Sejauh ini pelayanan dari aparat masih yang standar, seperti biasanya.

16. Apakah ada upaya dari aparat desa untuk meningkatkan partisipasi?

Jawab:

Tidak ada terobosan baru yang dilakukan.

Informan 3

Tanggal Wawancara : 6 Oktober 2018

Tempat/ Waktu : Ladang di Desa Saitnihuta

Identitas Informan 3

1. Nama : Bapak Situmorang
2. Pekerjaan : Warga Desa Saitnihuta
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Memang setiap ada rapat desa, aparat desa membagikan undangan ke tiap rumah penduduk. Tapi yang menghadiri tidak semua, paling ada 1/3 saja yang hadir.

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Pekerjaan masyarakat disini mayoritas petani. Saya kira penurunan yang ada karena lahan pertanian susah diusahakan untuk kondisi sekarang. Cuaca tidak menentu, hujan tidak mampu mengairi sawah. Tanaman jagung yang sedang ditanam masyarakat kini terancam gagal. Kalau kebun kopi seperti yang saya sedang usahakan ini, sudah sejak lima tahun lalu saya usahakan, tapi saya membeli air beberapa tangki setiap minggu untuk menyiraminya.

3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

Memang pembangunan sudah mulai terasa sejak ada dana desa. Jalan desa sudah diperbaiki. Partisipasi masyarakat masih seperti yang dulu.

4. Apakah desa saitnihuta sudah bisa mandiri?

Jawab:

Belum.

5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Kalau saya pribadi saya selalu menyampaikan pendapat, baik kritik atau saran kepada Kepala Desa.

6. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa

Jawab:

Sebaiknya penduduk desa harus mengupayakan pertanian yang tidak mengandalkan hujan. Kebun kopi cukup menjanjikan, namun memang harus ada modal. Kalau bisa pemerintah memfasilitasi pinjaman lunak dari bank untuk masyarakat petani agar bisa tersedia modal kerja untuk bertani.

7. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Sebenarnya masyarakat desa saitnihuta sangat mendukung pembangunan. Kantor desa sekarang, tanahnya berasal dari hibah masyarakat untuk dibangun.

8. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Memungkinkan. Karena tidak ada yang menggerakkan, jadi masyarakat tidak tahu.

9. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa saitnihuta untuk mengembangkan wilayah desa saitnihuta sebagai desa wisata?

Jawab:

Kurang tahu, karena saya tidak tau komposisi dana desa.

10. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Yang pertama, masalah modal kerja. Yang kedua, fasilitas, seperti penyediaan air bersih, masih sangat sulit untuk daerah bukit.

11. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

Sejauh ini, kepala desa selalu mengundang masyarakatnya untuk ikut rapat.

12. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa? (terkait membangun komunikasi efektif)

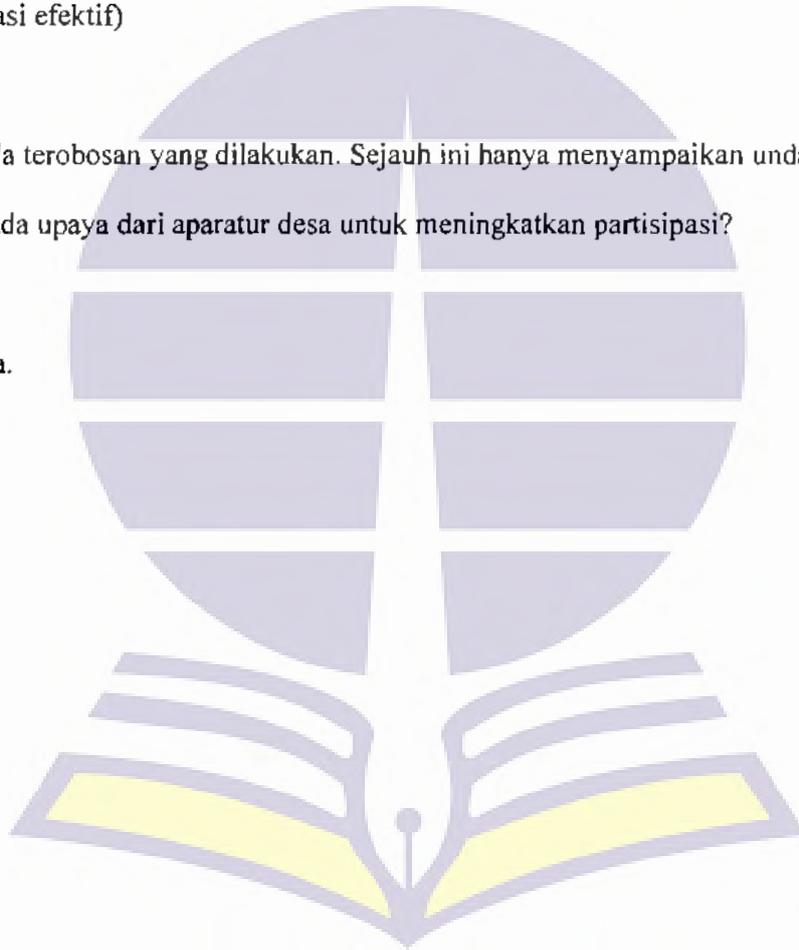
Jawab:

Belum ada terobosan yang dilakukan. Sejauh ini hanya menyampaikan undangan

13. Apakah ada upaya dari aparat desa untuk meningkatkan partisipasi?

Jawab:

Tidak ada.



Informan 4

Tanggal Wawancara : 6 Oktober 2018

Tempat/ Waktu : Rumah Bapak Sitanggung

Identitas Informan 4

1. Nama : Bapak Sitanggung
2. Pekerjaan : Pemuka Agama Desa Saitnihuta
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Yang datang pada kegiatan tersebut adalah yang terlibat aktif atas kehendak sendiri.

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Sampai saat ini belum.

3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

MASih sama seperti dulu, partisipasi belum ada peningkatan.

4. Apakah desa saitnihuta sudah bisa mandiri?

Jawab:

Belum.

5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Jawab:

Sebagian kecil saja saya kira.

6. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Pada dasarnya masyarakat sangat siap untuk pembangunan.

7. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Yang memiliki areal kosong itu adalah nenek moyang suatu keluarga, dan belum ada pembagian warisan kepada para ahli warisnya. Karena itu sebagian besar lahan banyak yang kosong, karena masalah pembagian kepemilikan yang belum jelas diantara ahli waris.

8. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa saitnihuta untuk mengembangkan wilayah desa saitnihuta sebagai desa wisata?

Jawab:

Kalau dalam musrembangdes itu merupakan keputusan, saya kira itu memungkinkan.

9. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Masalah iklim barangkali, lalu masalah infrastruktur yang masih sangat minim.

10. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

Sebatas menyurati masyarakat desa sudah dilakukan dan pemberitahuan dari kepala dusun masing – masing.

11. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?

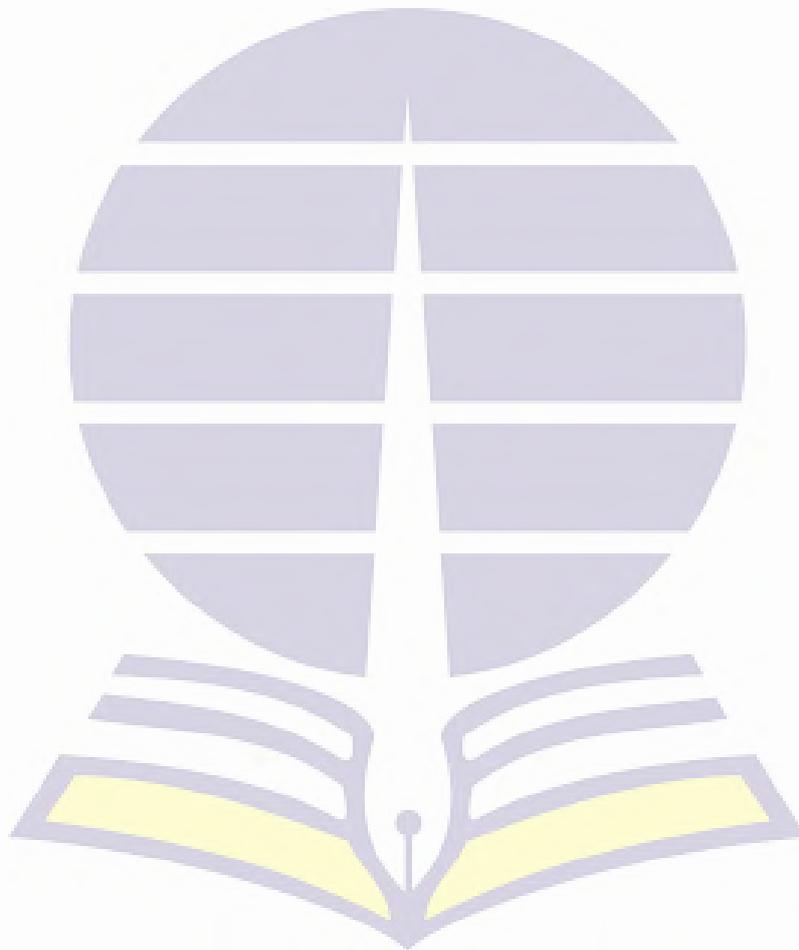
Jawab:

Tidak ada.

12. Apakah ada upaya dari aparaturnya untuk meningkatkan partisipasi?

Jawab:

Sejauh ini tidak ada.



Informan 5

Tanggal Wawancara : 8 Oktober 2018

Tempat/ Waktu : Rumah Bapak Sitanggung

Identitas Informan 5

1. Nama : Bapak Sitanggung
2. Pekerjaan : Warga Desa Saitnihuta
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

YA.

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Tidak ada. Yang miskin masih tetap miskin.

3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

Tidak tau

4. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Jawab:

Sepanjang ada yang mau disampaikan, akan disampaikan kepada aparat desa maupun langsung ke kepala desa.

5. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Pada dasarnya siap untuk melaksanakan pembangunan.

6. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Areal persawahan yang tidak diolah karena menyebabkan perselisihan diantara ahli waris. Khususnya ahli waris yang saat ini posisinya berada di luar kota, mereka tidak setuju lahan tersebut digunakan.

7. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

Pemerintah desa selalu menyurati masyarakat dan menyebarkan undangan agar masyarakat menghadiri kegiatan rapat desa.

8. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?

Jawab:

Pemerintah desa sudah sangat gampang dijumpai, mereka selalu standby di kantor desa.

Informan 6

Tanggal Wawancara : 8 Oktober 2018
Tempat/ Waktu : Rumah Bapak Siregar

Identitas Informan 6

1. Nama : Bapak Siregar
2. Pekerjaan : Ketua BUMDes Saitnihuta
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Sebagian atas kehendak sendiri. Dan rata – rata yang hadir memang atas kehendak mereka sendiri.

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Belum bisa secara nyata dilihat mengenai perbaikan taraf hidup masyarakat rendah, karena pembangunan desa baru dirintis.

3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

Masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi karena ada upah kerjanya, jadi tidak murni ingin memberi tenaga.

4. Apakah desa saitnihuta sudah bisa mandiri?

Jawab:

Belum. Mandiri itu berarti punya penghasilan sendiri, mapan, sementara penghasilan desa hanya bersumber dari dana desa, BUMDes masih baru saja dibentuk dan belum punya usaha nyata.

5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Jawab:

Bagi beberapa orang, kritik dan saran memang disampaikan langsung ke kepala desa.

6. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa

Jawab:

BUMDes saat ini kami rancang untuk membuat wisata pantai. Kondisi pantai saat ini yang landai sangat cocok untuk dijadikan wahana air. Rencananya akan dibuatkan boat, dengan rute aek rangat dan tano ponggol. Apabila jembatan tano ponggol sudah selesai dibangun, sesuai gambar, akan menjadi jembatan yang megah dan menjadi ikon kota pangururan. Tentunya wisatawan tak ingin melewatkan sensasi berlayar dibawah jembatan tersebut. Aekrangat sangat indah dan air panas membuat setiap orang ingin berendam. Pengalaman berlayar kesana tentu akan sangat menarik. Persoalannya, masyarakat mengklaim bahwa pantai tersebut adalah milik mereka, sesungguhnya kami menunggu penetapan peraturan mengenai batasan wilayah yang dikuasai masyarakat, yakni 50 meter dari garis pantai, sehingga pantai tersebut adalah milik Negara.

7. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Pada dasarnya siap dan mendukung

8. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Untuk mengalihfungsikan, persoalan yang dihadapi adalah masalah kepemilikan. Karena lahan yang ada merupakan warisan, dan ahli waris sebagian besar tinggal di kota lain.

Hal tersebut menjadi kendala untuk alih fungsi.

9. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa saat ini untuk mengembangkan wilayah desa saat ini sebagai desa wisata?

Jawab:

Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah penyediaan infrastruktur. Mungkin setelah infrastruktur dibenahi, pengembangan wisata boleh diprogramkan.

10. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Yang pertama masalah kepemilikan tanah. Kedua, masalah modal.

11. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

Komunikasi yang dibangun aparat pemerintah komunikasi yang wajar dan sangat umum.

12. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?

Jawab:

Belum ada terobosan sikap dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi warga. Tetapi dalam hal pengurusan administrasi, kepala desa dan aparat desa sudah sangat aktif dan selalu dapat dihubungi.

13. Apakah ada upaya dari aparat desa untuk meningkatkan partisipasi?

Jawab:

Belum ada terobosan atau hal yang bersifat baru.

Informan 7

Tanggal Wawancara : 9 Oktober 2018

Tempat/ Waktu : Rumah Bapak Malau

Identitas Informan 7

1. Nama : Bapak Malau
2. Pekerjaan : Warga Desa Saitnihuta (Pemilik Lahan)
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Tidak tahu

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Justru penurunan yang terjadi.

3. Apakah meningkat partisipasi masyarakat setelah ada pembangunan?

Jawab:

Tidak tahu

4. Apakah desa saitnihuta sudah bisa mandiri?

Jawab:

tidak

5. Apakah masyarakat menyampaikan kritik dan saran?

Jawab:

Tidak tahu

6. Rencana pengembangan potensi ekonomi desa

Jawab:

-

7. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

-

8. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Sangat sulit, karena lahan tersebut merupakan lahan warisan, dan ahli warisnya ada beberapa orang. Untuk menyatukan persepsi sangat susah, karena itulah penyebab lahan tersebut dibiarkan kosong tanpa diolah.

9. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa sarnihuta untuk mengembangkan wilayah desa sarnihuta sebagai desa wisata?

Jawab:

Tidak tahu

10. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Tidak tahu

11. Apakah telah dibangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat?

Jawab:

-

12. Apakah ada perubahan sikap dari aparat pemerintah desa?

Jawab:

-

Informan 8

Tanggal Wawancara : 10 Oktober 2018

Tempat/ Waktu : Rumah Bapak Sinurat

Identitas Informan 8

1. Nama : Bapak Sinurat
2. Pekerjaan : Warga Desa Saitnihuta (Pemilik Lahan)
3. Jenis Kelamin : Laki – laki

Hasil Wawancara

1. Dalam kegiatan desa, mulai dari perencanaan, apakah masyarakat desa terlibat secara aktif atas kehendak sendiri?

Jawab:

Ya, saya terlibat karena kehendak sendiri.

2. Apakah ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat rendah?

Jawab:

Sampai saat ini, pelaksanaan pembangunan di Saitnihuta, belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

3. Kesiapan masyarakat desa untuk pembangunan

Jawab:

Pada dasarnya masyarakat siap untuk melaksanakan pembangunan.

4. Apakah memungkinkan jika areal persawahan yang tidak dikelola dialihfungsikan untuk membangun fasilitas umum untuk menambah daya tarik wisata?

Jawab:

Kalau untuk menghibahkan langsung kepada pemerintah, tidak siap, tapi kalau dikelola secara bersaa – sama dan memberikan keuntungan kedua belah pihak, mungkin bisa dipertimbangkan.

5. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa saitnihuta untuk mengembangkan wilayah desa saitnihuta sebagai desa wisata?

Jawab:

Tergantung kepala desa.

6. Apa kendala pengembangan potensi ekonomi desa yang dihadapi?

Jawab:

Sawah yang ada masih tadah hujan, sementara cuaca kurang bagus beberapa tahun terakhir ini, sehingga penanaman padi belum bisa dilakukan.

